

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I.

Dokumen LAKIP 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Isu Strategis, Sistematika Laporan, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja beserta Kronologis Perubahan, Metode Pengukuran Kinerja, DIPA beserta Kronologis Perubahan, Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja, Kinerja Kegiatan Lainnya, Analisis Realisasi Anggaran, Analisis Perbandingan Kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja, Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan, Kesimpulan serta Rekomendasi dan Tindak Lanjut. Dokumen LAKIP 2025 yang disusun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I merupakan penjabaran teknis dari 5 (lima) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Kami berharap Dokumen LAKIP 2025 ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I. Kami menyadari bahwa Dokumen LAKIP 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Dokumen LAKIP ini di masa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Dokumen LAKIP ini. Semoga Tuhan selalu menyertai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Pontianak, 26 Januari 2026



Kepala
 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
 dan Kawasan Permukiman Kalimantan I,

Ir. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
 NIP. 197308272003121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
EXECUTIVE SUMMARY	9
BAB 1 PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Tugas dan Fungsi	12
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	13
1.3.1. Sebaran Pegawai di Lingkungan BP3KP Kalimantan I	15
1.3.2. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	18
1.3.3. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan	18
1.3.4. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	19
1.3.5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender	19
1.3.6. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia	20
1.4. Sarana dan Prasarana.....	20
1.5. Isu Strategis.....	25
1.6. Sistematika Laporan	27
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	28
2.1. Rencana Strategis	28
2.1.1. Tujuan.....	28
2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	29
2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Kalimantan I	36
2.1.4. Sasaran Program.....	37
2.1.5. Program dan Kegiatan.....	40
2.2. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja.....	43
2.2.1. Kronologis Perubahan PK DIPA Sekretariat Jenderal	43
2.2.2. Kronologis Perubahan PK DIPA Ditjen Kawasan Permukiman	44
2.2.3. Kronologis Perubahan PK DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan	44
2.2.4. Kronologis Perubahan PK DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan	45
2.2.5. Kronologis Perubahan PK DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko ..	46

2.3. Metode Pengukuran Kinerja.....	46
2.4. DIPA dan Kronologis Perubahan DIPA.....	49
2.4.1. Kronologis Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal (691409).....	49
2.4.2. Kronologis Perubahan DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691463).....	50
2.4.3. Kronologis Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691517).....	50
2.4.4. Kronologis Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691571).....	52
2.4.5. Kronologis Perubahan DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691606)	53
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	55
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	55
3.2. Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I	57
3.2.1. Capaian Kinerja terhadap PK Sekretariat Jenderal.....	57
3.2.2. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Kawasan Permukiman	57
3.2.3. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Perumahan Perdesaan	58
3.2.4. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Perumahan Perkotaan	59
3.2.5. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	60
3.3. Kinerja Kegiatan Lainnya	61
3.3.1. Realisasi Tindak Lanjut SKB 3 Menteri	61
3.3.2. Kegiatan BSPS, Pembangunan Rumah Susun, Penanganan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah TA.2025	62
3.3.3. Layanan Klinik PKP	68
3.4. Analisis Realisasi Anggaran.....	70
3.4.1. Realisasi Anggaran pada Unit Kerja BP3KP Kalimantan I	70
3.4.2. Rincian Realisasi Anggaran pada Satker Balai	73
3.5. Analisis Perbandingan Kinerja	76
3.5.1. Analisis Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Unit Kerja BP3KP Lainnya	76
3.5.2. Analisis Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Renstra.....	79
3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	81
3.6.1. Analisis atas SDM.....	81
3.6.2. Analisis atas Sarana dan Prasarana, serta Anggaran.....	82
3.7. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja.....	83
3.8. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan	84
3.8.1. Faktor Pendukung Keberhasilan.....	84
3.8.2. Faktor Penyebab Kegagalan	85
BAB 4 PENUTUP	86

4.1. Kesimpulan	86
4.1.1. Kendala/Permasalahan dan Saran	86
4.1.2. Terobosan atau Usulan BP3KP Kalimantan I	87
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	88
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Organisasi UPT	13
Tabel 1.2 Sebaran Jumlah Pegawai ASN BP3KP Kalimantan I	15
Tabel 1.3 Daftar Nama Pegawai ASN BP3KP Kalimantan I	15
Tabel 1.4 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN	18
Tabel 1.5 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan	18
Tabel 1.6 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	19
Tabel 1.7 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender	19
Tabel 1.8 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia	20
Tabel 1.9 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2024	20
Tabel 1.10 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2023	22
Tabel 1.11 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2022	22
Tabel 1.12 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2021	23
Tabel 1.13 Rekapitulasi Aset Satker Balai BP3KP Kalimantan I Tahun Perolehan 2020	24
Tabel 1.14 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2019	25
Tabel 1.15 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2017	25
Tabel 1.16 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2016	25
Tabel 2.1 Daftar Kode Satker DIPA	28
Tabel 2.2 Intervensi Langsung dan Tidak Langsung kegiatan BP3KP Kalimantan I	36
Tabel 2.3 Penjabaran Program dan Kegiatan BP3KP Kalimantan I di bawah Sasasan Strategis-1	38
Tabel 2.4 Penjabaran Program dan Kegiatan BP3KP Kalimantan I di bawah Sasasan Strategis-2	39
Tabel 2.5 Daftar Kegiatan BP3KP Kalimantan I	40
Tabel 2.6 Target Kinerja 2025-2029 BP3KP Kalimantan I	41
Tabel 2.7 Kronologis Perubahan PK pada Sekretariat Jenderal	43
Tabel 2.8 Kronologis Perubahan PK pada Ditjen Kawasan Permukiman	44
Tabel 2.9 Kronologis Perubahan PK pada Ditjen Perumahan Perdesaan	44
Tabel 2.10 Kronologis Perubahan PK pada Ditjen Perumahan Perkotaan	45
Tabel 2.11 Kronologis Perubahan PK pada Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	46
Tabel 2.12 Kronologis DIPA Sekretariat Jenderal (691409)	49
Tabel 2.13 Kronologis DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691463)	50
Tabel 2.14 Kronologis DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691517)	50
Tabel 2.15 Kronologis DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691571)	52
Tabel 2.16 Kronologis DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691606)	53
Tabel 3.1 Rincian Nilai Akuntabilitas Kinerja BP2P Kalimantan I Tahun 2023	55

Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP 2023 BP2P Kalimantan I	56
Tabel 3.3 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Sekretariat Jenderal	57
Tabel 3.4 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Ditjen Kawasan Permukiman	58
Tabel 3.5 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Ditjen Perumahan Perdesaan	59
Tabel 3.6 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Ditjen Perumahan Perkotaan	60
Tabel 3.7 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	60
Tabel 3.8 Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	62
Tabel 3.9 Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	62
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Kegiatan BSPS Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	63
Tabel 3.11 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per Satuan Kerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I ...	70
Tabel 3.12 BP3KP Kalimantan I DIPA Sekretariat Jenderal	71
Tabel 3.13 BP3KP Kalimantan I DIPA Ditjen Kawasan Permukiman	71
Tabel 3.14 BP3KP Kalimantan I DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan	72
Tabel 3.15 BP3KP Kalimantan I DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan	72
Tabel 3.16 BP3KP Kalimantan I DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	72
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Sekretariat Jenderal (691409)	73
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691463)	73
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691517)	74
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691571)	75
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691606)	76
Tabel 3.22 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per Satuan Kerja TA.2025 BP3KP Kalimantan II ..	77
Tabel 3.23 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per Satuan Kerja TA.2025 BP3KP Sumatera III ...	77
Tabel 3.24 Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Renstra	79
Tabel 3.25 Faktor Pendukung Keberhasilan	84
Tabel 3.26 Faktor Penyebab Kegagalan	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT	14
Gambar 1.2 Persentase Sebaran Jumlah Pegawai ASN	15
Gambar 1.3 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN	18
Gambar 1.4 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	19
Gambar 1.5 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender	19
Gambar 2.1 Pohon Kinerja Sasaran Program BP3KP Kalimantan I.....	38
Gambar 3.1 Peta Sebaran Kegiatan BSPS, Pembangunan Rusun, Penanganan Kumuh dan Sanitasi TA.2025 BP3KP Kalimantan I	63
Gambar 3.2. Pelaksanaan Program BSPS di Wilayah Kalimantan Barat.....	64
Gambar 3.3. Pelaksanaan Program BSPS di Wilayah Kalimantan Tengah.....	65
Gambar 3.4. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun di Wilayah Kalimantan Barat	66
Gambar 3.5. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun di Wilayah Kalimantan Tengah .	66
Gambar 3.6. Kegiatan Penanganan Kumuh di Wilayah Kalimantan Barat	67
Gambar 3.7. Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Wilayah Kalimantan Barat	68
Gambar 3.8. Status Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Wilayah Kalimantan Barat.....	68
Gambar 3.9 Peta Sebaran Layanan Klinik PKP Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	69
Gambar 3.10 Diagram Target dan Capaian Layanan Klinik PKP periode Agustus-Desember 2025	69
Gambar 3.11 Diagram Realisasi Pelaksanaan Anggaran BP3KP Kalimantan I.....	70
Gambar 3.12 Grafik Perbandingan Komposisi Pagu (atas) dan Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran (bawah) BP3KP Kalimantan I, BP3KP Kalimantan II, dan BP3KP Sumatera III	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	89
Lampiran 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	90
Lampiran 3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	91
Lampiran 4 Kondisi Prasarana Gedung Kantor BP3KP Kalimantan I	92
Lampiran 5 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I - Sekretariat Jenderal	97
Lampiran 6 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I – Ditjen Kawasan Permukiman	98
Lampiran 7 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I – Ditjen Perumahan Perdesaan	99
Lampiran 8 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I – Ditjen Perumahan Perkotaan	100
Lampiran 9 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I – Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko .	101
Lampiran 10 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I - Sekretariat Jenderal	102
Lampiran 11 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I – Ditjen Kawasan Permukiman	103
Lampiran 12 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I – Ditjen Perumahan Perdesaan	104
Lampiran 13 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I – Ditjen Perumahan Perkotaan	105
Lampiran 14 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I – Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	106
Lampiran 15 BA Kesepakatan Capaian Output Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat	107
Lampiran 16 BA Kesepakatan Capaian Output Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah	111

EXECUTIVE SUMMARY

Tujuan utama penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mencakup peningkatan akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, disertai dengan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta penguatan tata kelola dan pengendalian risiko yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui kolaborasi lintas pihak. Selain itu, ditetapkan pula tujuan peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diukur melalui indikator persentase peningkatan tata kelola, sehingga keseluruhan upaya diarahkan untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program perumahan dan permukiman.

Kementerian PKP periode 2025–2029 menetapkan dua Sasaran Strategis, yaitu SS-1 “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan” dengan enam Sasaran Program (SP) yang mencakup peningkatan hunian layak di kawasan permukiman, penanganan permukiman kumuh, penguatan ekosistem perumahan, penyediaan hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan maupun perkotaan, serta tata kelola dan pengendalian risiko; dan SS-2 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP” dengan tujuh Sasaran Program yang berfokus pada peningkatan kualitas dukungan manajemen di berbagai direktorat serta pengawasan intern. Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BP3KP Kalimantan I berperan mengintervensi sejumlah Sasaran Program, yaitu SP-1, SP-2, dan SP-3 yang diturunkan dari SS-1, serta SP-1 yang diturunkan dari SS-2, sehingga kontribusinya diarahkan untuk mendukung pencapaian target perumahan dan permukiman sekaligus memperkuat tata kelola dan manajemen internal kementerian.

Isu strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I mencakup tantangan multidimensi yang meliputi penyelarasan kebijakan nasional dan daerah untuk mengurangi backlog perumahan serta menangani kawasan kumuh, tekanan sosial akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang menuntut inovasi pembiayaan bagi MBR, keterbatasan anggaran dan fluktuasi harga material yang memerlukan efisiensi serta kemitraan dengan swasta, keterbatasan lahan dan risiko bencana yang menuntut penataan kawasan berkelanjutan, serta pentingnya sinergi kelembagaan, transparansi, dan sistem monitoring yang kuat. Semua aspek ini menuntut pendekatan holistik, integratif, dan adaptif agar rencana aksi kinerja mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjamin keberlanjutan penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Pada Tahun Anggaran 2025, rata-rata Capaian kinerja pada BP3KP Kalimantan I untuk kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal yaitu sebesar 100%, kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu sebesar 100%, kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan yaitu sebesar 99.77%, kegiatan Penyelenggaraan

Perumahan Perkotaan yaitu sebesar 99.81%, dan kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 100%.

DIPA Sekretariat Jenderal pada BP3KP Kalimantan I mencakup DIPA pada satker Balai 691409, Satker PKP Kalbar 691410, dan Satker PKP Kalteng 691411, dengan total pagu Rp 2.352.276.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 2.086.723.612 (Dua Miliar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) atau sebesar 88.71%. Dari tiga satker tersebut, Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki progres keuangan tertinggi yaitu sebesar 91.55%.

DIPA Ditjen Kawasan Permukiman pada BP3KP Kalimantan I mencakup DIPA pada satker Balai 691463, Satker PKP Kalbar 691464, dan Satker PKP Kalteng 691465, dengan total pagu Rp 42.375.886.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 38.066.641.818 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) atau sebesar 89.83%. Dari tiga satker tersebut, Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki progres keuangan tertinggi yaitu sebesar 95.68%.

DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan pada BP3KP Kalimantan I mencakup DIPA pada satker Balai 691517, Satker PKP Kalbar 691518, dan Satker PKP Kalteng 691519, dengan total pagu Rp 54.436.327.000,- (Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 49.071.045.928 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 90.14%. Dari tiga satker tersebut, Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki progres keuangan tertinggi yaitu sebesar 99.63%.

DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan pada BP3KP Kalimantan I mencakup DIPA pada satker Balai 691571, Satker PKP Kalbar 691572, dan Satker PKP Kalteng 691573, dengan total pagu Rp 32.779.004.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 31.859.820.207 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) atau sebesar 97.20%. Dari tiga satker tersebut, Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki progres keuangan tertinggi yaitu sebesar 99.01%.

DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada BP3KP Kalimantan I mencakup DIPA hanya pada satker Balai 691606 dengan total pagu Rp 303.466.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 270.625.200 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 89.18%.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kementerian ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas yang diemban, Kementerian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki susunan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
- c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
- d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
- f. Inspektorat Jenderal
- g. Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang

- h. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan
- i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Lembaga
- j. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Unit Pelaksana Teknis atau disingkat dengan UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT dalam hal ini secara khusus yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I mempunyai tugas, yaitu:

- a. Melaksanakan penyediaan perumahan;
- b. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Melaksanakan pengembangan kawasan permukiman;
- d. Melaksanakan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan
- e. Melaksanakan fasilitasi serah terima aset.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I sebagai UPT menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;

- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

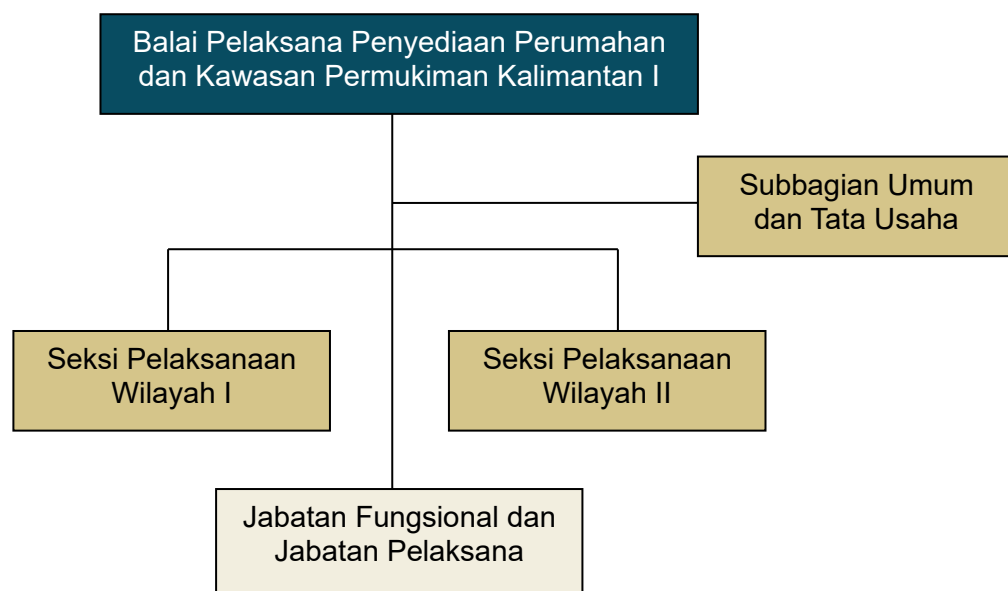
Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Tabel 1.1 Susunan Organisasi UPT

No.	Jabatan	Tugas
1	Subbagian Umum dan Tata Usaha	a. Melakukan penyusunan program dan anggaran, b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
2	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan

		permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
3	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
4	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

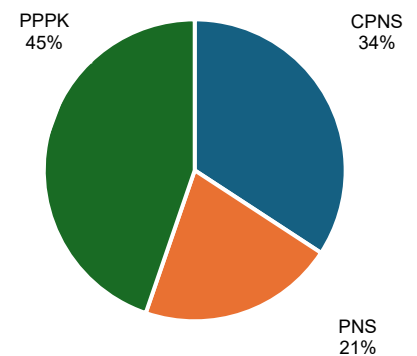


Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPT

[illegible]

1.3.2. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan Status Kepegawaian ASN, pegawai CPNS pada BP3KP Kalimantan I berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, PNS 16 (enam belas) orang dan PPPK 30 (tiga puluh) orang. Rincian kelompok pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.4. Balai dan Satker PKP Kalimantan Barat memiliki pegawai CPNS terbanyak yaitu masing-masing 11 (sebelas) orang. Sedangkan untuk PPPK terbanyak berada di satker Balai sejumlah 17 (tujuh belas) orang. Dalam persentase (lihat Gambar 1.3), PPPK menempati komposisi terbesar yaitu 45%, diikuti oleh CPNS sebesar 34%, dan PNS sebesar 21%.



Gambar 1.3 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN

Tabel 1.4 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN

No	Unit Kerja	CPNS	PNS	PPPK	Jumlah Pegawai
1	Balai	11	5	17	33
2	Satker PKP Kalimantan Barat	11	6	8	25
3	Satker PKP Kalimantan Tengah	4	5	9	18
Total Pegawai		26	16	34	76

1.3.3. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan

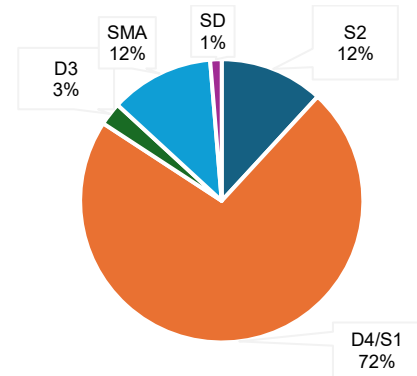
Berdasarkan Golongan Jabatan, pegawai ASN pada BP3KP Kalimantan I didominasi oleh pegawai PNS dengan golongan jabatan III/a sejumlah 26 (dua puluh enam) orang dan PPPK dengan golongan IX sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Jumlah pegawai dengan golongan IV/a dan IV/b masing-masing hanya berjumlah 1 (satu) orang. Namun terdapat 4 (empat) pegawai PPPK tanpa golongan dengan status PPPK Paruh Waktu. Rincian kelompok pegawai berdasarkan golongan jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan

No	Unit Kerja	Golongan											Total Pegawai
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	IX	VII	V	I	-	
1	Balai	1	1	1	1	1	11	12	1	1	-	3	33
2	Satker PKP Kalimantan Barat	-	-	1	4	1	11	4	1	2	-	1	25
3	Satker PKP Kalimantan Tengah	-	-	1	3	1	4	7	-	1	1	-	18
Total Pegawai		1	1	3	8	3	26	23	2	4	1	4	76

1.3.4. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, pegawai ASN pada BP3KP Kalimantan I didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan D4/S1 sejumlah 55 (lima puluh lima) orang atau sebesar 72%, dan sedikitnya terdapat ASN dengan kualifikasi pendidikan SD sejumlah 1 (satu) orang. Pegawai dengan pendidikan S2 dan SMA keduanya masing-masing berjumlah 9 (sembilan) orang. Rincian kelompok pegawai berdasarkan golongan jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.6 dan Gambar 1.4.



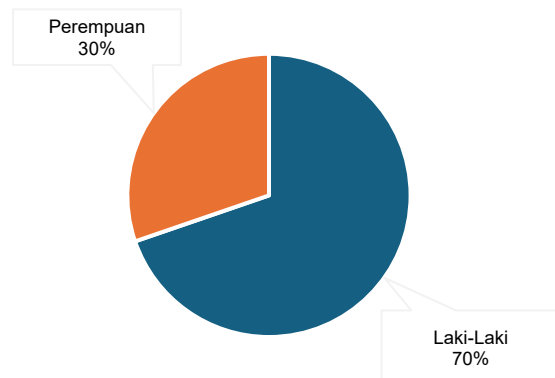
Gambar 1.4 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.6 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan					Total Pegawai
		S2	D4/S1	D3	SMA	SD	
1	Balai	5	22	1	5	-	33
2	Satker PKP Kalimantan Barat	1	20	1	3	-	25
3	Satker PKP Kalimantan Tengah	3	13	-	1	1	18
Total Pegawai		9	55	2	9	1	76

1.3.5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Berdasarkan Gender, komposisi pegawai ASN pada BP3KP Kalimantan I didominasi oleh pegawai Laki-laki sebesar 70% atau sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang. Sedangkan 30% pegawai merupakan perempuan atau sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Secara rinci, komposisi pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.7 dan Gambar 1.5



Gambar 1.5 Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Tabel 1.7 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	Balai	23	10	33
2	Satker PKP Kalimantan Barat	18	7	25
3	Satker PKP Kalimantan Tengah	12	6	18
Total Pegawai		53	23	76

1.3.6. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Tabel 1.8 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Unit Kerja	Rentang Usia				Total Pegawai
		20-29	30-39	40-49	50-60	
1	Balai	12	10	6	5	33
2	Satker PKP Kalimantan Barat	8	12	3	2	25
3	Satker PKP Kalimantan Tengah	3	9	4	2	18
Total Pegawai		23	31	13	9	76

1.4. Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai target kinerja organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. BP3KP Kalimantan I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung program nasional memiliki sarana dan prasarana fisik khususnya pada satker balai, dijelaskan pada tabel berikut dan dikelompokkan berdasarkan tahun perolehan mulai dari 2024 hingga 2016 berikut dengan kode barang, nama barang, merk/tipe, satuan, kuantitas/jumlah, nilai perolehan dan kondisi barang. Total Nilai Aset (Nilai Perolehan Menurut Hasil Inventarisasi) yang dimiliki oleh BP3KP Kalimantan I yaitu Rp 1.208.687.547 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Tabel 1.9 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2024

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Menurut Inventarisasi)	Kondisi
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	2024	Lemari Besi	Buah	1	2.800.000	Baik
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	2024	Lemari Arsip 2 Pintu	Buah	1	4.000.000	Baik
3	3050104001	Lemari Besi/Metal	2024	Lemari Arsip 2 Pintu	Buah	1	4.000.000	Baik
4	3050104001	Lemari Besi/Metal	2024	Lemari Arsip 2 Pintu	Buah	1	4.000.000	Baik
5	3050104002	Lemari Kayu	2024	Lemari	Buah	1	3.280.000	Baik
6	3050104013	Buffet	2024	BUFET CB-02 CASERINI	Buah	1	1.396.250	Baik
7	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2024	Paket CCTV	Buah	1	1.086.850	Baik
8	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2024	Paket CCTV	Buah	1	1.086.850	Baik
9	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2024	Paket CCTV	Buah	1	1.086.850	Baik
10	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2024	Paket CCTV	Buah	1	1.086.850	Baik
11	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2024	Paket CCTV	Buah	1	1.086.850	Baik
12	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2024	Paket CCTV	Buah	1	1.086.850	Baik
13	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2024	Paket CCTV	Buah	1	1.086.850	Baik
14	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2024	Paket CCTV	Buah	1	1.086.850	Baik
15	3050105048	LCD Projector/Infocus	2024	MPC SMART PROJECTOR MPJ-02 BLK	Buah	1	9.999.000	Baik
16	3050201002	Meja Kerja Kayu	2024	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.500.000	Baik
17	3050201002	Meja Kerja Kayu	2024	Meja Kerja 1/2	Buah	1	1.500.000	Baik

				Biro				
18	3050201002	Meja Kerja Kayu	2024	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.500.000	Baik
19	3050201002	Meja Kerja Kayu	2024	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.500.000	Baik
20	3050201002	Meja Kerja Kayu	2024	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.500.000	Baik
21	3050201002	Meja Kerja Kayu	2024	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.500.000	Baik
22	3050201002	Meja Kerja Kayu	2024	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.500.000	Baik
23	3050201002	Meja Kerja Kayu	2024	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.500.000	Baik
24	3050201002	Meja Kerja Kayu	2024	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	6.000.000	Baik
25	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Direksi	Buah	1	3.587.500	Baik
26	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Direksi	Buah	1	1.553.050	Baik
27	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Direksi	Buah	1	1.794.020	Baik
28	3050201032	Rak Dapur	2024	Rak Piring	Buah	1	1.776.000	Baik
29	3050204001	Lemari Es	2024	Sharp 2 Pintu	Buah	1	2.832.500	Baik
30	3050204004	A.C. Split	2024	TCL	Buah	1	3.708.000	Baik
31	3050204004	A.C. Split	2024	DENPOO	Buah	1	3.700.000	Baik
32	3050206002	Televisi	2024	LED SHARP 4T-C 55EJ 2X	Buah	1	6.050.000	Baik
33	3050206008	Sound System	2024	Pas Pro15F3	Buah	1	4.433.000	Baik
34	3050206036	Dispenser	2024	Polytron PWC615X	Buah	1	1.919.000	Baik
35	3060105038	GPS Receiver	2024	Garmin GPS MAP. G5 S. Multi-Band	Buah	1	9.200.000	Baik
36	3060201023	Battery Lithium-I	2024	Battery Mavic 2	Buah	1	5.325.700	Baik
37	3100102001	P.C Unit	2024	ASUS All-in-One PC	Buah	1	10.185.000	Baik
38	3100102002	Lap Top	2024	ACER A514-56P-57Q8 15	Buah	1	8.555.400	Baik
39	3100102002	Lap Top	2024	ACER A514-56P-57Q8 15	Buah	1	8.555.400	Baik
40	3100102002	Lap Top	2024	ACER A514-56P-57Q8 15	Buah	1	8.555.400	Baik
41	3100102002	Lap Top	2024	ACER A514-56P-57Q8 15	Buah	1	8.595.862	Baik
42	3100102009	Tablet PC	2024	IPAD PRO 114TH GEN CELL 256GB SPG	Buah	1	23.158.000	Baik
43	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	Epson L3210	Buah	1	2.470.970	Baik
44	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	Epson L3210	Buah	1	2.470.970	Baik
45	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	EPSON A3 L3210	Buah	1	2.270.300	Baik
46	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2024	APP PENCIL 2ND GEN-ITP	Buah	1	1.849.000	Baik
47	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
48	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
49	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
50	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
51	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
52	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
53	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
54	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
55	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
56	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Susun Warna Biru	Buah	1	570.000	Baik
57	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Besi Metal	Buah	1	570.000	Baik
58	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Kursi Besi Metal	Buah	1	570.000	Baik
59	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Alfa	Buah	1	453.500	Baik
60	3050201003	Kursi Besi/Metal	2024	Alfa	Buah	1	453.500	Baik
61	3060102167	Drone	2024	Dji	Buah	1	752.600	Baik
TOTAL						61	187.214.722	

Tabel 1.10 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2023

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Menurut Inventarisasi)	Kondisi
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	2023	Camry	Buah	1	3.500.000	Baik
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	2023	Camry	Buah	1	3.500.000	Baik
3	3050105017	Mesin Absensi	2023	FINGERSPOT REVO WF-206BNC	Buah	1	5.450.000	Baik
4	3050201002	Meja Kerja Kayu	2023	Camry	Buah	1	1.700.000	Baik
5	3050201002	Meja Kerja Kayu	2023	Camry	Buah	1	1.700.000	Baik
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	2023	Camry	Buah	1	1.700.000	Baik
7	3050201002	Meja Kerja Kayu	2023	Camry	Buah	1	1.700.000	Baik
8	3050201003	Kursi Besi/Metal	2023	Camry	Buah	1	1.000.000	Baik
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	2023	Camry	Buah	1	1.000.000	Baik
10	3050201003	Kursi Besi/Metal	2023	Camry	Buah	1	1.000.000	Baik
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	2023	Camry	Buah	1	1.000.000	Baik
12	3050204004	A.C. Split	2023	TCL	Buah	1	4.500.000	Baik
13	3050204004	A.C. Split	2023	TCL	Buah	1	4.500.000	Baik
14	3050204004	A.C. Split	2023	TCL	Buah	1	4.500.000	Baik
15	3050204004	A.C. Split	2023	TCL	Buah	1	4.500.000	Baik
16	3050204007	Exhaust Fan	2023	Panasonic	Buah	1	1.050.000	Baik
17	3050204007	Exhaust Fan	2023	Panasonic	Buah	1	1.050.000	Baik
18	3050204007	Exhaust Fan	2023	Panasonic	Buah	1	1.050.000	Baik
19	3050206035	Kaca Hias	2023	Cermin	Buah	1	1.750.000	Baik
20	3050206036	Dispenser	2023	Miyako	Buah	1	2.280.000	Baik
21	3050206036	Dispenser	2023	Miyako	Buah	1	2.280.000	Baik
22	3050206036	Dispenser	2023	Miyako	Buah	1	2.280.000	Baik
23	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
24	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
25	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
26	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
27	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
28	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
29	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
30	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
31	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
32	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
33	3050206057	Vertikal Blind	2023	Sharp Point	Buah	1	2.200.000	Baik
34	3060102128	Camera Digital	2023	Canon EOS M50 Mark II Kit 15-45mm Black	Buah	1	14.000.000	Baik
35	3060102167	Drone	2023	Mavic 2 PRO DJI RC1A	Buah	1	40.000.000	Baik
36	3100102002	Lap Top	2023	ASUS VIVOBOOK PRO 14 OLED M3401QC	Buah	1	18.950.000	Baik
37	3100102002	Lap Top	2023	ASUS VIVOBOOK PRO 14 OLED M3401QC	Buah	1	18.950.000	Baik
TOTAL						37	169.090.000	

Tabel 1.11 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2022

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Menurut Inventarisasi)	Kondisi
1	3050104004	Rak Kayu	2022	Rak Buku Kayu	Buah	1	3.300.000	Baik
2	3050104004	Rak Kayu	2022	Rak Sepatu Kayu	Buah	1	1.000.000	Baik
3	3050104007	Brandkas	2022	Brankas Daiko	Buah	1	8.500.000	Baik
4	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	2022	Papan Nama Plang Kantor	Buah	1	11.300.000	Baik
5	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	2022	Papan Nama Ruang Kabalai	Buah	1	17.800.000	Baik
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja 1/2 BIRO	Buah	1	2.250.000	Baik
7	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja 1/2 BIRO	Buah	1	2.250.000	Baik
8	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	11.150.000	Baik
9	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.115.000	Baik
10	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.115.000	Baik
11	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.115.000	Baik
12	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.115.000	Baik
13	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.115.000	Baik
14	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	1.115.000	Baik

				Biro				
15	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja Kayu ELCO	Buah	1	2.250.000	Baik
16	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja Kayu ELCO	Buah	1	2.250.000	Baik
17	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja 1/2 BIRO	Buah	1	1.100.000	Baik
18	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Tunggu Besi	Buah	1	1.550.000	Baik
19	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Direksi	Buah	1	1.115.000	Baik
20	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Direksi	Buah	1	1.115.000	Baik
21	3050201014	Meja Resepsionis	2022	Meja Resepsionis	Buah	1	5.100.000	Baik
22	3050201033	Sofa	2022	Sofa Tamu	Buah	1	13.600.000	Baik
23	3050204004	A.C. Split	2022	Panasonic	Buah	1	9.150.000	Baik
24	3050204004	A.C. Split	2022	Panasonic	Buah	1	9.150.000	Baik
25	3100102001	P.C Unit	2022	PC All In One (AIO)	Buah	1	9.000.000	Baik
26	3100102001	P.C Unit	2022	All In One (AIO) 2,5"	Buah	1	9.000.000	Baik
27	3100102002	Lap Top	2022	ASUS CORE i7 / N7400PC-OLED714	Buah	1	23.776.000	Baik
28	3100102002	Lap Top	2022	Dell Precision 5570-002 (JHD33T3)	Buah	1	42.428.525	Baik
29	3100102002	Lap Top	2022	Dell Precision 3570-001 (13DKBS3)	Buah	1	72.500.000	Baik
30	3100102009	Tablet PC	2022	SAMSUNG	Buah	1	5.500.000	Baik
31	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	EPSON A3 L14150	Buah	1	15.500.000	Baik
32	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	EPSON A4 L3210	Buah	1	2.000.000	Baik
33	3050104004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2022	EPSON WORK PORCE DS-410	Buah	1	6.500.000	Baik
34	3050104004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2022	EPSON SCANNER EPSON DS 410	Buah	1	5.900.000	Baik
35	8010101001	Software Komputer	2022	5D BIM Cubicost	Buah	1	55.500.000	Baik
36	8010101001	Software Komputer	2022	5D BIM Cubicost	Buah	1	55.500.000	Baik
37	8010101001	Software Komputer	2022	5D BIM Cubicost	Buah	1	55.500.000	Baik
38	8010101001	Software Komputer	2022	5D BIM Cubicost	Buah	1	55.500.000	Baik
39	3050201002	Meja Kerja Kayu	2022	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	700.000	Baik
40	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
41	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
42	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
43	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
44	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
45	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
46	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
47	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
48	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
49	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
50	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
51	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
52	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
53	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
54	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
55	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
56	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
57	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
58	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
59	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
60	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
61	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
62	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
63	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
64	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
65	3050201003	Kursi Besi/Metal	2022	Kursi Besi Metal	Buah	1	500.000	Baik
TOTAL						65	538.424.525	

Tabel 1.12 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2021

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Menurut Inventarisasi)	Kondisi
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	2021	Lemari Besi 2 Pintu	Buah	1	3.070.000	Baik
2	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	2021	Meja MT 150 CM 240-18	Buah	1	4.500.000	Baik
3	3050201002	Meja Kerja Kayu	2021	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	2.050.000	Baik
4	3050201002	Meja Kerja Kayu	2021	Meja Kerja 1/2	Buah	1	2.050.000	Baik

				Biro				
5	3050201002	Meja Kerja Kayu	2021	Meja Kerja 1/2 Biro	Buah	1	2.050.000	Baik
6	3050204004	A.C. Split	2021	Panasonic	Buah	1	4.450.000	Baik
7	3050204004	A.C. Split	2021	Panasonic	Buah	1	4.450.000	Baik
8	3050204004	A.C. Split	2021	Panasonic	Buah	1	4.450.000	Baik
9	3050204004	A.C. Split	2021	A.C SPLIT	Buah	1	4.800.000	Baik
10	3050204004	A.C. Split	2021	A.C SPLIT	Buah	1	4.800.000	Baik
11	3050204004	A.C. Split	2021	A.C SPLIT	Buah	1	4.800.000	Baik
12	3100102001	P.C Unit	2021	PC All In One (AIO)	Buah	1	8.000.000	Baik
13	3100102001	P.C Unit	2021	PC All In One (AIO)	Buah	1	8.000.000	Baik
14	3100102001	P.C Unit	2021	PC All In One (AIO)	Buah	1	8.000.000	Baik
15	3100102002	Lap Top	2021	UX-482EG-KA551IPS	Buah	1	26.000.000	Baik
16	3100102002	Lap Top	2021	K413FQ-EK501TIPS	Buah	1	14.000.000	Baik
17	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	PRINTER EPSON A3 L1300	Buah	1	9.000.000	Baik
18	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	PRINTER EPSON A4 L3110	Buah	1	3.750.000	Baik
19	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	PRINTER EPSON A4 L3110	Set	1	3.750.000	Baik
20	3050201003	Kursi Besi/Metal	2021	Kursi Rapat	Buah	1	479.000	Baik
21	3050201003	Kursi Besi/Metal	2021	Kursi Rapat	Buah	1	479.000	Baik
TOTAL						21	122.928.000	

Tabel 1.13 Rekapitulasi Aset Satker Balai BP3KP Kalimantan I Tahun Perolehan 2020

No.	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Menurut Inventarisasi)	Kondisi
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	2020	Lemari Besi 2 Pintu	Buah	1	4.352.000	Baik
2	3050104005	Filing Cabinet Besi	2020	Filling Kabinet 4 Laci	Buah	1	3.400.000	Rusak Ringan
3	3050201002	Meja Kerja Kayu	2020	Meja MT 120 CM BO6	Buah	1	3.750.000	Baik
4	3050201002	Meja Kerja Kayu	2020	Meja 1/2 BIRO	Buah	1	1.800.000	Rusak Ringan
5	3050201002	Meja Kerja Kayu	2020	Meja MT 150 CM 240-18	Buah	1	4.750.000	Baik
6	3050201002	Meja Kerja Kayu	2020	Meja MT 120 CM BO6	Buah	1	3.750.000	Baik
7	3050201002	Meja Kerja Kayu	2020	Meja MT 120 BO6	Buah	1	3.750.000	Baik
8	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Direksi	Buah	1	3.350.000	Baik
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Direksi KD8133	Buah	1	2.550.000	Rusak Ringan
10	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Direksi KD8134	Buah	1	2.550.000	Baik
11	3100102001	P.C Unit	2020	PC ALL IN ONE (AIO) 2,5"	Buah	1	16.000.000	Baik
12	3100102002	Lap Top	2020	LAPTOP ASUS UX434FLC-A501T	Buah	1	21.650.000	Baik
13	3100102002	Lap Top	2020	NOTEBOOK ASUS ROG G531 GD-1705G4T STRIX III-G	Buah	1	19.800.000	Baik
14	3100102002	Lap Top	2020	LAPTOP ASUS K413FQ-EK502T	Buah	1	14.000.000	Baik
15	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	PRINTER EPSON 14 L3110	Buah	1	3.000.000	Baik
16	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Rapat	Buah	1	479.000	Baik
17	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Rapat	Buah	1	479.000	Baik
18	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Rapat	Buah	1	479.000	Baik
19	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Rapat	Buah	1	479.000	Baik
20	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Rapat	Buah	1	479.000	Baik
21	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Rapat	Buah	1	479.000	Baik
22	3050201003	Kursi Besi/Metal	2020	Kursi Rapat	Buah	1	479.000	Baik
TOTAL						22	111.805.000	

Tabel 1.14 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2019

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Menurut Inventarisasi)	Kondisi
1	3050104004	Rak Kayu	2016	FUJIMA	Buah	1	990.000	Rusak Berat
2	3050105048	LCD Projector/Infocus	2016	EPSON EB-X300	Buah	1	7.400.000	Baik
3	3050201002	Meja Kerja Kayu	2016	FUJITA	Buah	1	880.000	Rusak Ringan
4	3050201002	Meja Kerja Kayu	2016	FUJITA	Buah	1	880.000	Rusak Ringan
5	3100102001	P.C Unit	2016	ASUS K31CD-ID002D	Buah	1	9.950.000	Baik
6	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	HP LASER JET PRO P1102	Buah	1	1.500.000	Rusak Ringan
7	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	HP LASER JET PRO P1102	Buah	1	1.500.000	Rusak Ringan
8	3050104004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2016	SCANNER EPSON DS-410	Buah	1	5.245.300	Baik
TOTAL						8	28.345.300	

Tabel 1.15 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2017

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Menurut Inventarisasi)	Kondisi
1	3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2017	UPS ICA 700VA	Buah	1	890.000	Baik
TOTAL						1	890.000	

Tabel 1.16 Daftar BMN BP3KP Kalimantan I Berdasarkan Tahun Perolehan 2016

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Satuan	Kuantitas	Nilai Perolehan (Menurut Inventarisasi)	Kondisi
1	3050206002	Televisi	2019	Samsung	Buah	1	19.998.000	Baik
2	3060102128	Camera Digital	2019	-	Buah	1	9.997.000	Baik
3	3100102002	Lap Top	2019	ASUS ROG A4097J-EK752T	Buah	1	19.995.000	Baik
TOTAL						3	49.990.000	

Untuk Prasarana yang digunakan oleh BP3KP Kalimantan I yaitu berupa Gedung Kantor dengan Luas Tanah 1.629 M2 dan Luas Bangunan 720.6 M2. Bangunan gedung kantor tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan status pinjam pakai. (Nomor SK: 1864/BKAD/2023 tanggal 27 November 2023) dengan masa pinjam pakai berakhir 26 November 2026. Bangunan Gedung Kantor berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kondisi bangunan yaitu kondisi fisik kantor kurang baik, lantai bangunan rendah dari jalan, sehingga memerlukan peninggian lantai, mempertimbangkan kondisi pasang air sungai pada musim tertentu, serta memerlukan pengembangan luasan ruang.

1.5. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut dimensi kebijakan, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Pertama, tantangan kebijakan nasional berupa target pengurangan backlog perumahan dan penanganan kawasan kumuh menuntut balai untuk menyelaraskan program dengan RPJMN, Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta kebijakan daerah. Hal ini

memerlukan konsistensi perencanaan, sinkronisasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

Kedua, dari sisi sosial dan demografi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kalimantan menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan perumahan layak huni. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, sehingga diperlukan inovasi skema subsidi, kredit mikro, maupun kemitraan dengan lembaga keuangan. Selain itu, keberagaman budaya dan pola permukiman masyarakat lokal menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif dan inklusif.

Ketiga, dari aspek ekonomi dan pembiayaan, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi isu strategis yang harus diatasi melalui optimalisasi sumber daya, efisiensi program, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Fluktuasi harga material konstruksi juga berpotensi meningkatkan biaya pembangunan, sehingga strategi pengadaan dan distribusi material harus dirancang dengan cermat.

Keempat, dari perspektif lingkungan dan tata ruang, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan serta potensi konflik penggunaan lahan dengan sektor lain (perkebunan, kehutanan, industri) menjadi tantangan besar. Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor mengancam keberlanjutan permukiman. Oleh karena itu, penataan kawasan harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mitigasi risiko bencana, serta perlindungan lingkungan hidup.

Kelima, sinergi kelembagaan dan tata kelola menjadi isu strategis yang krusial. Keberhasilan program perumahan dan permukiman tidak dapat dicapai hanya oleh Kementerian PKP melalui BP3KP Kalimantan I saja, melainkan membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, sektor swasta, dan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja harus diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program.

Dengan demikian, isu strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I mencakup tantangan multidimensi yang menuntut pendekatan holistik, integratif, dan adaptif. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja harus mampu menjawab isu-isu tersebut melalui strategi yang terukur, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan dalam LAKIP ini mencakup Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, serta Penutup, dengan penjelasan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penyusunan laporan, tugas dan fungsi organisasi, serta gambaran struktur organisasi dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dijelaskan pula sarana dan prasarana yang tersedia, isu-isu strategis yang dihadapi, serta sistematika laporan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini memaparkan rencana strategis sebagai arah kebijakan organisasi, perjanjian kinerja beserta kronologis perubahan yang terjadi, serta metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai capaian. Dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) juga dijelaskan sebagai instrumen pendanaan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja yang mencakup perjanjian kinerja, program, prioritas, proyek nasional, dan pantauan KSP. Selain itu, terdapat analisis perbandingan kinerja, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pemanfaatan informasi dalam pelaporan kinerja. Bab ini juga menyoroti faktor pendukung keberhasilan maupun penyebab kegagalan dalam pencapaian target.

Bab IV Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dari keseluruhan proses pelaporan, rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Lampiran

Bagian tambahan sebagai data dukung untuk melengkapi, memperkuat, memberikan bukti dukung terhadap isi utama pembahasan pada bab atau subbab sebelumnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2025 ini, Balai dan Satker memiliki lebih dari 1 (satu) DIPA dengan gambaran jumlah DIPA yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025 ini, BP3KP Kalimantan I memiliki 5 (lima) DIPA termasuk di dalamnya DIPA di bawah Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang hanya ada pada Balai saja, sedangkan Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat dan Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing hanya memiliki 4 (empat) DIPA.

Tabel 2.1 Daftar Kode Satker DIPA

Balai/ Satker	DIPA				
	Sekretariat Jenderal	Ditjen Kawasan Permukiman	Ditjen Perumahan Perdesaan	Ditjen Perumahan Perkotaan	Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Balai P3KP Kalimantan I	691409	691463	691517	691571	691606
Satker PKP Kalimantan Barat	691410	691464	691518	691572	
Satker PKP Kalimantan Tengah	691411	691465	691519	691573	

Sumber : Analisis 2025

2.1. Rencana Strategis

Pembahasan mengenai Rencana Strategis diambil dari dokumen Rencana Strategis 2025-2029 BP3KP Kalimantan I yang meliputi Tujuan, Arah dan Kebijakan Strategi Unit Organisasi, Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Kalimantan I, Sasaran Program serta Program dan Kegiatan BP3KP Kalimantan I.

2.1.1. Tujuan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I merumuskan tujuan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden memiliki misi yaitu delapan Asta Cita. Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025– 2029, Kementerian menjadi penyokong utama Asta Cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029. Selain menyokong Asta Cita Nomor 6 menjadi Misi Kementerian, Kementerian juga mendukung terlaksananya Asta Cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan dua tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan

program Kementerian selama periode 2025–2029. Masing-masing tujuan tersebut disertai dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Sebagaimana terlampir pada Tujuan Kementerian dikemukakan berikut ini.

a. Tujuan pertama adalah:

“Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”

Tujuan Pertama ini memiliki indikator:

- 1) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
- 2) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
- 3) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
- 4) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
- 5) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
- 6) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
- 7) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
- 8) Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
- 9) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

b. Tujuan kedua adalah:

“Peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan unit organisasi dalam pembahasan ini meliputi 5 (lima) unit organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yaitu:

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:

- a) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - b) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - c) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - d) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal.
- 2) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
- a) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - b) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - c) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- 3) Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.
- 4) Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:
- a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b) Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - c) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
 - e) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
 - f) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan meliputi:

- 1) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - c) Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perdesaan;
 - d) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

- e) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
- 2) Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - a) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - b) Pengembangan skema tabungan berencana;
 - c) Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - d) Pengembangan skema Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR);
 - e) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - f) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
- 3) Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
 - a) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - b) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - c) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - d) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - e) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - f) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - g) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- 4) Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - a) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - b) Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan

- penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
- c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d) Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- e) Penguatan kelembagaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan meliputi:

- 1) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - a) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - b) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - c) Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - d) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu (mixed-use, TOD).
- 3) Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- 4) Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - a) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - b) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - c) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d) Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - e) Penguatan kelembagaan.

- 5) Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan.
- 6) Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank.
- 7) Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
- 8) Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko meliputi:

- 1) Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
- 2) Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- 3) Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program* atau IGHP).
 - b) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - c) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.

- d) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
- 4) Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 5) Meningkatkan kemitraan dengan stakeholder lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan stakeholder lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- 6) Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:
 - a) *Governance*, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - b) *Risk*, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - c) *Compliance*, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d) *Financing*, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP (Indonesia Green Affordable Housing Program), skema *off-take guarantee*; dan
 - e) Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian PKP melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- 1) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - a) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - b) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- 2) Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - a) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - b) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- 3) Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
 - a) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi;

- b) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - c) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- 4) Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
 - a) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia; dan
 - b) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- 5) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
 - a) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - b) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- 6) Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
 - a) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - b) Digitalisasi dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- 7) Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
 - a) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - b) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- 8) Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
 - a) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - b) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e-Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
- 9) Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
 - a) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis TI, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - b) Kolaborasi lintas K/L dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- 10) Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
 - a) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
 - b) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Kalimantan I

Sejalan dengan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dimuat dalam dokumen RPJPN 2020-20245, RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian PKP 2025-2029, dan Renstra dari masing-masing Unit Organisasi (Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Unit Pelaksana Teknis dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I yaitu:

- a) Meneruskan dari rumusan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi MBR;
- b) Mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
- c) Penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik sebagai bentuk strategi pelaksanaan;
- d) Dengan pendekatan menyeluruh, Program Pembangunan dan Renovasi 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung rumusan target Kementerian PKP dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat intervensi langsung maupun intervensi tidak langsung yang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Intervensi Langsung dan Tidak Langsung kegiatan BP3KP Kalimantan I

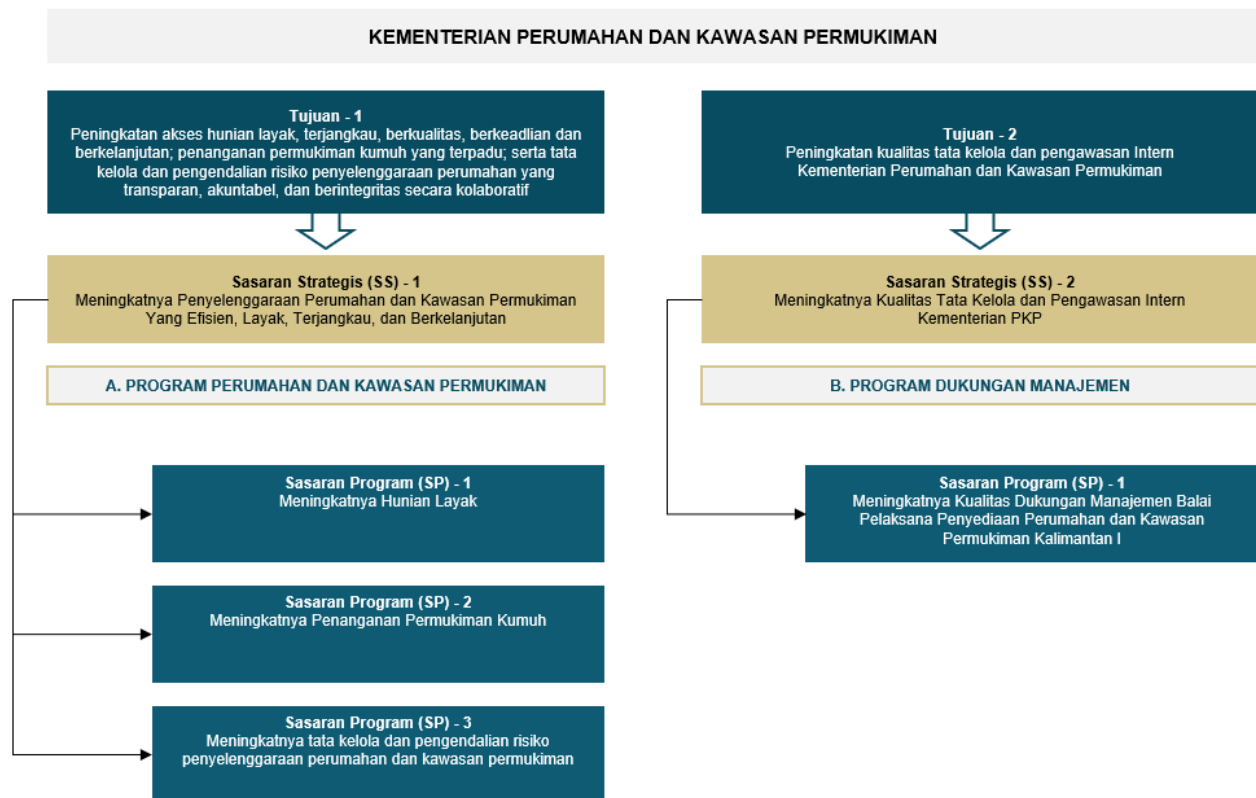
A. Intervensi Langsung	
1)	Pembangunan Rumah Baru berupa hunian vertikal (Rumah Susun) dan/atau hunian tapak (Rumah Khusus) untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat;
2)	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, dan Penyediaan Sanitasi Layak;
3)	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan pada hunian tapak dan/vertikal untuk mendukung fungsi hunian yang layak dan terintegrasi, baik pada hunian tapak maupun vertikal;
4)	Peningkatan kualitas permukiman kumuh;
5)	Memberikan layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (Klinik PKP) bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi, pendampingan, dan solusi teknis terkait pembangunan maupun renovasi rumah.

B. Intervensi Tidak Langsung	
1)	Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan, termasuk melalui program CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Tiga Juta Rumah;
2)	Penguatan dan sosialisasi informasi program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Subsidi FLPP dalam menyediakan akses terhadap perumahan yang terjangkau dengan bunga dan cicilan rendah, tenor panjang, serta uang muka ringan bagi MBR dalam rangka mempermudah transisi dari pola sewa ke kepemilikan rumah, dan mendorong investasi jangka panjang;
3)	Penguatan dan pemantauan implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Kementerian PKP, Kementerian PU, dan Kemendagri) terkait dengan pembebasan biaya BPHTB serta pembebasan retribusi PBG dan percepatan penerbitan PBG untuk rumah MBR;
4)	Pendampingan kepada Pemerintah Daerah melalui fasilitasi koordinasi penyusunan dokumen <i>readiness criteria</i> dalam proses pengusulan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) yang juga menjadi instrumen strategis dalam percepatan penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di daerah;
5)	Pelaksanaan koordinasi bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya berkaitan dengan pendataan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam upaya memnuhi capaian program 3 juta rumah.

2.1.4. Sasaran Program

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I melaksanakan kegiatan dengan mengintervensi beberapa Sasaran Program sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1, yaitu tiga sasaran program yang diturunkan dari sasaran strategis SS-1, dan satu sasaran program yang diturunkan dari sasaran strategis SS-2.

Sasaran Program dari Kementerian PKP yang diintervensi yaitu Sasaran Program SP-1 “Meningkatnya Hunian Layak”, SP-2 “Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh”, dan SP-3 “Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman” yang diturunkan dari Sasaran Strategis SS-1 “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”. Sedangkan untuk sasaran program yang diturunkan dari Sasaran Strategis SS-2 yaitu terdapat Sasaran Program SP-1 “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I”.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja Sasaran Program BP3KP Kalimantan I

Tabel 2.3 Penjabaran Program dan Kegiatan BP3KP Kalimantan I di bawah Sasaran Strategis-1

Tujuan 1: Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif		
SS-1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
SP-1: Meningkatnya Hunian Layak		
K1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
	SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
K2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	
	SK	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
K3	Penyediaan Rumah Layak Huni	
	SK	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
K4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	
	SK	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan
SP-2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh		

K1	Penanganan Permukiman Kumuh	
	SK	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
SP-3: Meningkatkan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		
K1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	SK1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman
	SK2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
	SK3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Berdasarkan Tabel 2.3, terdapat empat kegiatan di bawah SP-1 di mana setiap kegiatan memiliki masing-masing satu sasaran kegiatan. Kemudian terdapat satu kegiatan di bawah SP-2 dan hanya memiliki satu sasaran kegiatan. Sedangkan di bawah SP-3 terdapat satu kegiatan yang memiliki tiga sasaran kegiatan. Ketiga sasaran program yang diintervensi oleh BP3KP Kalimantan I ini merupakan bagian dari Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2.4 Penjabaran Program dan Kegiatan BP3KP Kalimantan I di bawah Sasaran Strategis-2

Tujuan 2: Peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		
SS-2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP		
SP-1: Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I		
K1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	
	SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Berdasarkan Tabel 2.4 terdapat satu kegiatan yaitu K1 “Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I” yang berada di bawah SP-1, dan hanya memiliki satu sasaran kegiatan yaitu “Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I”. Sasaran program yang diintervensi oleh BP3KP Kalimantan I ini merupakan bagian dari Program Dukungan Manajemen.

2.1.5. Program dan Kegiatan

BP3KP Kalimantan I sebagai Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan dua program yaitu: 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 2) Program Dukungan Manajemen. Berikut ini Kegiatan 5 (lima) tahun periode 2025-2029 yang dilaksanakan BP3KP Kalimantan I sebagai penjabaran teknis dari lima Unit Organisasi, yaitu meliputi Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dalam pembahasan ini, Target kinerja dikelompokkan berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan satuan *output* sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatannya. Adapun beberapa Kegiatan yang menjadi bagian dari intervensi BP3KP Kalimantan I yaitu:

Tabel 2.5 Daftar Kegiatan BP3KP Kalimantan I

A. Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi; 2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum; 3. Penyediaan Rumah Layak Huni; 4. Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan; 5. Penanganan Permukiman Kumuh; 6. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman;
B. Program: Dukungan Manajemen	
	1. Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Secara garis besar total target kinerja dalam rentang tahun 2025 hingga tahun 2029 untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 43.884 (empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/ Laporan/ Kegiatan/ Unit/ Hektar. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen yaitu ditetapkan target kinerja sebesar 113 Layanan. Rincian mengenai gambaran target untuk masing-masing kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6 Target Kinerja 2025-2029 BP3KP Kalimantan I

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN		TARGET						
		SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit	3,061	10,200	10,201	10,201	10,221	43,884
Sasaran Program:	Meningkatnya Hunian Layak	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	3,044	10,196	10,197	10,197	10,197	43,831
K 1	Penyelenggaraan Sistem dan strategi	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	7	12	12	12	12	55
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	7	12	12	12	12	55
OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5
OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	3	-	-	-	-	3
OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4
OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1
OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	2	3	3	3	3	14
OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3	12
K 2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	-	807	808	808	808	3,231
SK 2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	-	807	808	808	808	3,231
OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	804	804	804	804	3,216
OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	-	-	-	-	-	-
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3
OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
K 3	Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	3,037	9,376	9,376	9,376	9,376	40,541
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	3,037	9,376	9,376	9,376	9,376	40,541
OK 1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	3,016	7,856	7,856	7,856	7,856	34,440
OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	1,426	1,426	1,426	1,426	5,704
OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	16	88	88	88	88	368
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4
OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	2	-	-	-	-	2
OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4
OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	3	-	-	-	-	3
OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
K 4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
SK 4	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4

Sasaran Program:	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	15.00	-	-	-	20.00	35
K 1	Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	15.00	-	-	-	20.00	35
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	15.00	-	-	-	20.00	35
OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	15.00	-	-	-	20.00	35
Sasaran Program:	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	2	4	4	4	4	18
K 1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	2	4	4	4	4	18
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4
OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5
OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2	9
OK 1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5
OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyupaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN	Layanan	9	26	26	26	26	113
Sasaran Program:	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Layanan	9	26	26	26	26	113
K 1	Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Layanan	9	26	26	26	26	113
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Layanan	9	26	26	26	26	113
OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15
OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15
OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	3	3	3	3	12
OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12
OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12
OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	3	3	3	15
OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4
OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4
OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12

BP3KP Kalimantan I memiliki beragam *output* kegiatan pada setiap sasaran kegiatan yang diturunkan dari sasaran program yang diintervensi. Dari Tabel 2.6, untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem dan Strategi ditetapkan target 2025-2029 yaitu sejumlah 55 rekomendasi kebijakan/ dokumen/ laporan/ kegiatan, kemudian pada kegiatan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum ditetapkan sejumlah 3.231 unit/ dokumen/ rekomendasi kebijakan, kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni sejumlah 40.541 unit/ laporan/ rekomendasi kebijakan, kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan sejumlah 4 rekomendasi kebijakan, kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh sejumlah 35 hektar, serta Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman sejumlah 18 laporan.

Pada Program Dukungan Manajemen hanya terdapat satu sasaran program yaitu “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I” dengan penetapan target 2025-2029 pada kegiatan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I yaitu sejumlah 113 layanan.

2.2. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I memiliki 5 (lima) DIPA yang menghasilkan lima Perjanjian Kinerja (PK) di bawah lima Unit Organisasi di atasnya yang meliputi: 1) Sekretariat Jenderal; 2) Ditjen Kawasan Permukiman; 3) Ditjen Perumahan Perdesaan; 4) Ditjen Perumahan Perkotaan; dan 5) Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Berikut ini penjelasan PK beserta kronologis perubahannya.

2.2.1. Kronologis Perubahan PK DIPA Sekretariat Jenderal

PK DIPA Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh Arifay Saini selaku Kepala BP3KP Kalimantan I dan Didyk Choiroel selaku Sekretaris Jenderal Kementerian PKP. Terdapat satu PK yang mengalami dua kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7 Kronologis Perubahan PK pada Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Target	Uraian
PK Awal	01 Agustus 2025	3 Layanan	Total anggaran BP3KP Kalimantan I (691409), Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (691410), dan Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (691411) adalah 1.894.208.000,-

PK Revisi-01	04 November 2025	3 Layanan	• Penambahan pagu pada Satker Balai dan Satker PKP Kalteng. Sehingga total anggaran 2.050.356.000,-
PK Revisi-02	17 November 2025	3 Layanan	• Penambahan pagu pada Satker Balai, Satker PKP Kalbar dan Satker PKP Kalteng. Sehingga total anggaran 2.352.276.000,-

2.2.2. Kronologis Perubahan PK DIPA Ditjen Kawasan Permukiman

PK DIPA Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh Arifay Saini selaku Kepala BP3KP Kalimantan I dan Fitrah Nur selaku Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Terdapat satu PK yang mengalami dua kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8 Kronologis Perubahan PK pada Ditjen Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Target	Uraian
PK Awal	29 Agustus 2025	3 Laporan 1 Rekomendasi Kebijakan 1282 Unit Rumah Swadaya 19.92 Hektar	• Adanya alokasi Pagu pelaporan pada satker Balai dan Satker PKP Kalbar. • Adanya alokasi Pagu Rumah Swadaya 1282 Unit pada Satker PKP Kalbar. • Adanya alokasi pagu Penanganan Permukiman Kumuh 19.92 Hektar pada Satker PKP Kalbar. Sehingga total anggaran 42.052.278.000,-
PK Revisi-01	31 Oktober 2025	3 Laporan 1 Rekomendasi Kebijakan 1279 Unit Rumah Swadaya 20.02 Hektar	• Adanya pengurangan jumlah alokasi unit Rumah Swadaya pada Satker PKP Kalbar, semula 1282 Unit menjadi 1279 Unit. • Adanya alokasi pagu Penanganan Permukiman Kumuh 0.1 Hektar pada Satker PKP Kalteng. Sehingga total anggaran 42.375.886.000,-

2.2.3. Kronologis Perubahan PK DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

PK DIPA Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh Arifay Saini selaku Kepala BP3KP Kalimantan I dan Imran selaku Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan. Terdapat satu PK yang mengalami dua kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Kronologis Perubahan PK pada Ditjen Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Target	Uraian
PK Awal	01 Agustus 2025	2 Laporan 1 Kegiatan 1 Unit Rumah Susun	Total anggaran BP3KP Kalimantan I (691517), Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (691518), dan Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (691519) adalah 8.866.478.000,-

PK Revisi-01	22 Agustus 2025	2 Laporan 1 Kegiatan 2261 Unit Rumah Swadaya 1 Unit Rumah Susun	- Adanya alokasi Pagu Rumah Swadaya 1578 Unit pada Satker PKP Kalbar. - Adanya alokasi Pagu Rumah Swadaya 683 Unit pada Satker PKP Kalteng. Sehingga total anggaran 57.416.920.000,-
PK Revisi-02	27 Oktober 2025	5 Laporan 1 Kegiatan 2199 Unit Rumah Swadaya 1 Unit Rumah Susun	- Adanya alokasi Pagu pelaporan pada satker Balai, Satker PKP Kalbar, dan Satker PKP Kalteng. - Adanya pengurangan jumlah alokasi unit Rumah Swadaya pada Satker PKP Kalbar, semula 1578 Unit menjadi 1575 Unit. - Adanya pengurangan jumlah alokasi unit Rumah Swadaya pada Satker PKP Kalteng, semula 683 Unit menjadi 624 Unit. Sehingga total anggaran 54.436.327.000,-

2.2.4. Kronologis Perubahan PK DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

PK DIPA Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh Arifay Saini selaku Kepala BP3KP Kalimantan I dan Sri Haryati selaku Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan. Terdapat satu PK yang mengalami tiga kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Kronologis Perubahan PK pada Ditjen Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja	Tanggal PK	Target	Uraian
PK Awal	01 Agustus 2025	3 Rekomendasi Kebijakan 3 Laporan 43 Unit Rumah Susun 2 Unit Rumah Swadaya	Total anggaran BP3KP Kalimantan I (691571), Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (691572), dan Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (691573) adalah 20.331.798.000,-
PK Revisi-01	29 Agustus 2025	3 Rekomendasi Kebijakan 3 Laporan 43 Unit Rumah Susun 2 Unit Rumah Swadaya	Penambahan pagu pada Satker Balai, Satker PKP Kalbar, dan Satker PKP Kalteng. Sehingga total anggaran 22.206.767.000,-
PK Revisi-02	01 September 2025	3 Rekomendasi Kebijakan 3 Laporan 43 Unit Rumah Susun 485 Unit Rumah Swadaya	- Penambahan pagu pada Satker Balai, Satker PKP Kalbar, dan Satker PKP Kalteng. - Adanya penambahan jumlah alokasi unit Rumah Swadaya pada Satker PKP Kalbar, semula 1 Unit menjadi 241 Unit. - Adanya pengurangan jumlah alokasi unit Rumah Swadaya pada Satker PKP Kalteng, semula 1 Unit menjadi 244 Unit. Sehingga total anggaran 32.758.803.000,-
PK Revisi-03	31 Oktober 2025	3 Rekomendasi Kebijakan 3 Laporan 43 Unit Rumah Susun 486 Unit Rumah Swadaya	Adanya penambahan jumlah alokasi unit Rumah Swadaya pada Satker PKP Kalbar, semula 241 Unit menjadi 242 Unit. Sehingga total anggaran 32.779.004.000,-

2.2.5. Kronologis Perubahan PK DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

PK DIPA Sekretariat Jenderal ditandangani oleh Arifay Saini selaku Kepala BP3KP Kalimantan I dan Azis Adriansyah selaku Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Terdapat satu PK yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Kronologis Perubahan PK pada Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja	Tanggal PK	Target	Uraian
PK	01 Agustus 2025	2 Rekomendasi Kebijakan	Total anggaran BP3KP Kalimantan I (691606) adalah 303.466.000,-

2.3. Metode Pengukuran Kinerja

Metode Pengukuran Kinerja yang pertama dilakukan dengan membandingkan antara **output capaian 2025 terhadap target kinerja yang tertuang dalam PK akhir tahun 2025** dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase.

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Laporan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Laporan TA. 2025}}{\text{Jumlah target Laporan pada PK 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Kegiatan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Kegiatan TA.2025}}{\text{Jumlah target Kegiatan pada PK 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Rekomendasi Kebijakan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Rekomendasi Kebijakan TA.2025}}{\text{Jumlah target Rekomendasi Kebijakan pada PK 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Unit (Rumah Susun / Rumah Swadaya):

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Jumlah Unit TA.2025}}{\text{Jumlah target Unit pada PK 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Luasan Hektar (Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian luasan Hektar yang ditangani secara terpadu TA.2025}}{\text{Jumlah target luasan Hektar yang ditangani secara terpadu pada target PK 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Layanan :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Layanan TA.2025}}{\text{Jumlah target Layanan pada PK 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Metode Pengukuran Kinerja yang kedua dilakukan dengan membandingkan antara **output capaian 2025 terhadap target yang tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025** dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase.

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Laporan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Laporan TA. 2025}}{\text{Jumlah target Laporan pada Dok.Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Kegiatan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Kegiatan TA.2025}}{\text{Jumlah target Kegiatan pada Dok.Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Rekomendasi Kebijakan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Rekomendasi Kebijakan TA.2025}}{\text{Jumlah target Rekomendasi Kebijakan pada Dok.Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Unit (Rumah Susun / Rumah Swadaya):

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Jumlah Unit TA.2025}}{\text{Jumlah target Unit pada Dok.Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Luasan Hektar (Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian luasan Hektar yang ditangani secara terpadu TA.2025}}{\text{Jumlah target luasan Hektar yang ditangani secara terpadu pada Dok. Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Layanan :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Layanan TA.2025}}{\text{Jumlah target Layanan pada Dok.Rencana Aksi 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Metode Pengukuran Kinerja yang ketiga dilakukan dengan membandingkan antara **output capaian 2025 terhadap target yang tertuang dalam Dokumen Renstra 2025-2029** dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase.

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Laporan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Laporan TA. 2025}}{\text{Jumlah target Laporan TA.2025 pada Dok.Renstra}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Kegiatan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Kegiatan TA.2025}}{\text{Jumlah target Kegiatan TA.2025 pada Dok.Renstra}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Rekomendasi Kebijakan:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Rekomendasi Kebijakan TA.2025}}{\text{Jumlah target Rekomendasi Kebijakan TA.2025 pada Dok.Renstra}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Unit (Rumah Susun / Rumah Swadaya):

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Jumlah Unit TA.2025}}{\text{Jumlah target Unit TA.2025 pada Dok.Renstra}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Luasan Hektar (Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian luasan Hektar yang ditangani secara terpadu TA.2025}}{\text{Jumlah target luasan Hektar yang ditangani secara terpadu TA.2025 pada Dok.Renstra}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Pengukuran Kinerja dengan output berupa Layanan :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi capaian Layanan TA.2025}}{\text{Jumlah target Layanan TA.2025 pada Dok.Renstra}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

Metode Pengukuran Kinerja yang keempat dilakukan dengan membandingkan antara **Realisasi Keuangan per 31 Desember 2025 terhadap Pagu Anggaran DIPA 2025** dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase realisasi keuangan.

$$\frac{\text{Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2025}}{\text{Pagu Anggaran DIPA 2025}} \times 100\% = \dots\dots \%$$

2.4. DIPA dan Kronologis Perubahan DIPA

BP3KP Kalimantan I memiliki 5 (lima) DIPA yang meliputi DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan, DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan dan DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Pada sub-bab ini pembahasan terbatas hanya DIPA pada satker Balai, tanpa membah DIPA Satker di bawahnya. Berikut adalah penjelasan kronologis perubahan DIPA yang melekat pada masing-masing Unit Organisasi.

2.4.1. Kronologis Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal (691409)

Pada DIPA Sekretariat Jenderal dengan kode satker 691409, terdapat tiga kali revisi DIPA dan empat kali revisi POK Satker dengan rincian kronologis perubahan DIPA sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.12. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 84.794.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 1.073.888.000,- pada DIPA Revisi ke-3.

Tabel 2.12 Kronologis DIPA Sekretariat Jenderal (691409)

DIPA Revisi Ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Uraian Singkat
0	DIPA awal	02/12/2025	Pagu awal DIPA Satker BP3KP Kalimantan I TA. 2025 sebesar Rp. 84.794.000,-
1	DIPA Revisi-01	11/06/2025	1. Nilai pagu bertambah, semula Rp. 84.794.000,- menjadi Rp. 972.208.000,- 2. Terdapat penambahan pagu pada komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran (7665.EBA.994.002) sebesar Rp. 887.414.000,-
2	DIPA Revisi-02	14/07/2025	1. Nilai pagu Tetap Rp. 972.208.000,- 2. Terdapat perubahan rencana penarikan awal yang semula di Bulan Mei menjadi di Bulan Juli.
	Revisi POK Satker-01	25/08/2025	1. Nilai pagu Tetap Rp. 972.208.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran (7665.EBA.994.002), yaitu belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-02	29/10/2025	1. Nilai pagu Tetap Rp. 972.208.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran (7665.EBA.994.002), yaitu belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-03	03/11/2025	1. Nilai pagu Tetap Rp. 972.208.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran (7665.EBA.994.002), yaitu belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
3	DIPA Revisi-03	14/11/2025	1. Nilai pagu bertambah, semula Rp. 972.208.000,- menjadi Rp. 1.073.888.000,- 2. Terdapat penambahan pagu pada komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran (7665.EBA.994.002) yang semula 972.208.000,-menjadi Rp. 1.073.888.000,-
	Revisi POK Satker-04	09/12/2025	1. Nilai pagu Tetap Rp. 1.073.888.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran (7665.EBA.994.002), yaitu belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.

2.4.2. Kronologis Perubahan DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691463)

Pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman dengan kode satker 691463, terdapat tiga kali revisi DIPA dan dua kali revisi POK Satker dengan rincian kronologis perubahan DIPA sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.13. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 50.000.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 535.508.000,- pada DIPA Revisi ke-3.

Tabel 2.13 Kronologis DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691463)

DIPA Revisi Ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Uraian Singkat
0	DIPA awal	02/12/2024	Pagu awal DIPA Satker BP3KP Kalimantan I TA. 2025 sebesar Rp. 50.000.000,-
1	DIPA Revisi-01	25/06/2025	1. Nilai pagu bertambah, semula Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 205.208.000,-
			2. Terdapat penambahan pagu pada KRO (7659.FAE) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sebesar Rp. 155.208.000,-
2	DIPA Revisi-02	14/07/2025	1. Nilai pagu Rp. 205.208.000,-
			2. Terdapat perubahan rencana penarikan awal yang semula di Bulan Mei menjadi di Bulan Juli.
3	DIPA Revisi-03	15/08/2025	1. Nilai pagu bertambah, semula Rp. 205.208.000,- menjadi Rp. 535.508.000,-
	Revisi POK Satker-01	21/11/2025	2. Terdapat penambahan pagu pada RO (7659.FAE.003) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh sebesar Rp. 330.300.000,-
			1. Nilai pagu Rp. 535.508.000,-
	Revisi POK Satker-02	12/12/2025	2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7659.FAE.003) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh dan RO (7659.PBF.001) kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa
			1. Nilai pagu Rp. 535.508.000,-
			2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7659.FAE.003) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh dan RO (7659.PBF.001) kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa

2.4.3. Kronologis Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691517)

Pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan dengan kode satker 691517, terdapat tiga kali revisi DIPA dan tujuh kali revisi POK Satker dengan rincian kronologis perubahan DIPA sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.14. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 86.928.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 498.538.000,- pada DIPA Revisi ke-3.

Tabel 2.14 Kronologis DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691517)

DIPA Revisi Ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Uraian Singkat
0	DIPA awal	02/12/2024	Pagu awal DIPA Satker BP3KP Kalimantan I TA. 2025 sebesar Rp. 86.928.000,-
1	DIPA Revisi-01	03/07/2025	1. Nilai pagu bertambah, semula Rp. 86.928.000,- menjadi

			Rp. 316.684.000,- 2. Terdapat penambahan pagu pada RO (7660.AEA.001) Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan sebesar Rp.229.756.000,-
2	DIPA Revisi-02	14/07/2025	1. Nilai pagu Rp. 316.684.000,- 2. Revisi halaman III DIPA.
	Revisi POK Satker-01	15/07/2025	1. Nilai pagu Rp. 316.684.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7660.AEA.001.100) Pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah penyelenggaraan perumahan perdesaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa
	Revisi POK Satker-02	09/09/2025	1. Nilai pagu Rp. 316.684.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7660.AEA.001.100) Pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah penyelenggaraan perumahan perdesaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa
3	DIPA Revisi-03	24/10/2025	1. Nilai pagu bertambah, semula Rp. 316.684.000,- menjadi Rp. 498.538.000,- 2. Terdapat penambahan pagu pada RO (7660.FAE.005) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan sebesar Rp. 181.854.000,-
	Revisi POK Satker-03	03/11/2025	1. Nilai pagu Rp. 498.538.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7660.AEA.001) pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah penyelenggaraan perumahan perdesaan dan (7660.FAE.005) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-04	17/11/2025	1. Nilai pagu Rp. 498.538.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7660.AEA.001) pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah penyelenggaraan perumahan perdesaan dan (7660.FAE.005) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-05	24/11/2025	1. Nilai pagu Rp. 498.538.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7660.AEA.001) pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah penyelenggaraan perumahan perdesaan dan (7660.FAE.005) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-06	02/12/2025	1. Nilai pagu Rp. 498.538.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7660.AEA.001) pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah penyelenggaraan perumahan perdesaan dan (7660.FAE.005) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-07	12/12/2025	1. Nilai pagu Rp. 498.538.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7660.AEA.001) pelaksanaan sinkronisasi program pusat dan daerah penyelenggaraan perumahan perdesaan dan (7660.FAE.005) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.

2.4.4. Kronologis Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691571)

Pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan dengan kode satker 691571, terdapat tiga kali revisi DIPA dan enam kali revisi POK Satker dengan rincian kronologis perubahan DIPA sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.15. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 100.000.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 1.181.193.000,- pada DIPA Revisi ke-3.

Tabel 2.15 Kronologis DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691571)

DIPA Revisi Ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Uraian Singkat
0	DIPA awal	02/12/2024	Pagu awal DIPA Satker BP3KP Kalimantan I TA. 2025 sebesar Rp. 100.000.000,-
1	DIPA Revisi-01	03/07/2025	1. Nilai pagu bertambah, semula Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 250.182.000,- 2. Terdapat penambahan pagu pada RO (7661.ABF.001) kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan sebesar Rp. 105.127.000,- dan (7661.FAE.001) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan sebesar Rp. 45.055.000,-
2	DIPA Revisi-02	14/07/2025	1. Nilai pagu Rp. 250.182.000,- 2. Revisi halaman III DIPA.
3	DIPA Revisi-03	09/08/2025	1. Nilai pagu bertambah, semula Rp. 250.182.000,- menjadi Rp. 1.181.193.000,- 2. Terdapat penambahan pagu pada RO (7661.ABF.001) Kebijakan, strategis dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan sebesar Rp. 282.470.000,-; (7661.ABF.004) Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan sebesar Rp. 171.235.000,-; (7661.ABF.005) Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan sebesar Rp. 282.470.000,- dan RO (7661.FAE.001) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan sebesar Rp.194.836.000,-
	Revisi POK Satker-01	25/08/2025	1. Nilai pagu Rp. 1.181.193.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7661.ABF.001) Kebijakan, strategis dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan; (7661.ABF.004) Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan; (7661.ABF.005) Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan dan RO (7661.FAE.001) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-02	10/11/2025	1. Nilai pagu Rp. 1.181.193.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7661.ABF.001) Kebijakan, strategis dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan; (7661.ABF.004) Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan; (7661.ABF.005) Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan dan RO (7661.FAE.001) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-03	26/11/2025	1. Nilai pagu Rp. 1.181.193.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7661.ABF.001) Kebijakan, strategis dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan;

			(7661.ABF.004) Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan; (7661.ABF.005) Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan dan RO (7661.FAE.001) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-04	26/11/2025	1. Nilai pagu Rp. 1.181.193.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7661.ABF.001) Kebijakan, strategis dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan; (7661.ABF.004) Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan; (7661.ABF.005) Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan dan RO (7661.FAE.001) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-05	10/12/2025	1. Nilai pagu Rp. 1.181.193.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7661.ABF.001) Kebijakan, strategis dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan; (7661.ABF.004) Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan; (7661.ABF.005) Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan dan RO (7661.FAE.001) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-06	11/12/2025	1. Nilai pagu Rp. 1.181.193.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7661.ABF.001) Kebijakan, strategis dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan; (7661.ABF.004) Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan; (7661.ABF.005) Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan dan RO (7661.FAE.001) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.

2.4.5. Kronologis Perubahan DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691606)

Pada DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan kode satker 691606, terdapat dua kali revisi DIPA dan tujuh kali revisi POK Satker dengan rincian kronologis perubahan DIPA sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.16. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 45.000.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 303.466.000,- pada DIPA Revisi ke-2.

Tabel 2.16 Kronologis DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691606)

DIPA Revisi Ke-	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Uraian Singkat
0	DIPA awal	02/12/2024	Pagu awal DIPA Satker BP3KP Kalimantan I TA. 2025 sebesar Rp. 45.000.000,-
1	DIPA Revisi-01	24/06/2025	1. Nilai pagu bertambah, semula Rp. 45.000.000,- menjadi Rp. 303.466.000,- 2. Terdapat penambahan pagu pada RO (7662.ABF.004) Kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas sebesar Rp. 129.233.000,- dan (7662.ABF.005) Kebijakan manajemen risiko dan

			pencegahan korupsi sebesar Rp. 129.233.000,-
2	DIPA Revisi-02	14/07/2025	1. Nilai pagu Rp. 303.466.000,- 2. Revisi halaman III DIPA.
	Revisi POK Satker-01	15/08/2025	1. Nilai pagu Rp. 303.466.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7662.ABF.004) Kebijakan keterbukaan publik dan akuntabilitas dan RO (7662.ABF.005) Kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa
	Revisi POK Satker-02	27/09/2025	1. Nilai pagu Rp. 303.466.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7662.ABF.004) Kebijakan keterbukaan publik dan akuntabilitas dan RO (7662.ABF.005) Kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa
	Revisi POK Satker-03	29/10/2025	1. Nilai pagu Rp. 303.466.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7662.ABF.004) Kebijakan keterbukaan publik dan akuntabilitas dan RO (7662.ABF.005) Kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-04	10/11/2025	1. Nilai pagu Rp. 303.466.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7662.ABF.004) Kebijakan keterbukaan publik dan akuntabilitas dan RO (7662.ABF.005) Kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-05	21/11/2025	1. Nilai pagu Rp. 303.466.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7662.ABF.004) Kebijakan keterbukaan publik dan akuntabilitas dan RO (7662.ABF.005) Kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-06	02/12/2025	1. Nilai pagu Rp. 303.466.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7662.ABF.004) Kebijakan keterbukaan publik dan akuntabilitas dan RO (7662.ABF.005) Kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.
	Revisi POK Satker-07	12/12/2025	1. Nilai pagu Rp. 303.466.000,- 2. Terdapat perubahan/ <i>balanced budget</i> komposisi pada RO (7662.ABF.004) Kebijakan keterbukaan publik dan akuntabilitas dan RO (7662.ABF.005) Kebijakan manajemen risiko dan pencegahan korupsi, yaitu pada belanja bahan dan belanja perjalanan dinas biasa.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I merupakan Balai yang saat ini berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2025 yang adalah pembaharuan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis sebelumnya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan I di bawah Direktorat Jenderal Perumahan.

Pada Tahun 2025 yang lalu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum melaksanakan Evaluasi AKIP pada Balai maupun Satker sebagai dampak dari terbentuknya Kementerian baru yang masih dalam penyesuaian baik dalam hal peraturan perundang-undangan maupun hal lain terkait lainnya. Sehingga dalam pembahasan ini, upaya peningkatan akuntabilitas kinerja menggunakan data hasil evaluasi AKIP 2023 sebagai dasar pembahasan. Pada Tahun 2024 BP2P Kalimantan I telah melaksanakan Evaluasi AKIP berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) TA.2023. Merujuk pada penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah implementasi atas AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun Anggaran 2023 dikategorikan BB (Sangat Baik), yang ditandai mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level staf, dengan pencapaian nilai 73,40 dengan rincian per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Nilai Akuntabilitas Kinerja BP2P Kalimantan I Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	73,40

Sumber : Sumber: Surat Direktur Jenderal Perumahan Nomor PW.0204-Dr/493 tanggal 13 Mei 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2023

Belum tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I disebabkan masih adanya kelemahan-kelemahan yang berdasarkan pada catatan rekomendasi dalam surat Direktur Jenderal Perumahan Nomor PW.0204-Dr/493 tanggal 13 Mei 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Tahun 2023 berupaya ditindaklanjuti sebagai berikut.

Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP 2023 BP2P Kalimantan I

Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Perencanaan Kinerja	1. Agar dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja berikutnya (Renstra) periode akan datang dapat memperhatikan deadline dalam publikasi pada e-Sakip sesuai dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2018.	1. Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen Rencana Strategis 2025-2029 BP3KP Kalimantan I memperhatikan deadline pengumpulan yaitu 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Renstra Kementerian PKP, yang merujuk pada Permen PKP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	2. Agar menyajikan penyusunan Laporan Monev Bulanan berikutnya dapat menyajikan secara rinci tindak lanjut atas permasalahan sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan kinerja	2. Akan dituangkan permasalahan beserta rencana tindak lanjutnya pada Laporan Kinerja Triwulan BP3KP Kalimantan I.
Pengukuran Kinerja	1. Agar dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja pada periode berikutnya (Renstra) dapat menyajikan Tata Cara Pengukuran masing-masing indikator kinerja.	1. Dalam Rencana Strategis 2025-2029 akan disajikan Tata Cara Pengukuran masing-masing indikator kinerja.
	2. Agar dalam penyusunan Laporan Bulanan berikutnya dapat mencantumkan Capaian Kinerja terhadap PK secara detail	2. Dalam Laporan Kinerja Triwulan BP3KP Kalimantan I telah dicantumkan Capaian Kinerja terhadap PK secara detail.
	3. Agar dalam Pengukuran Kinerja (SKP) dapat dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment.	3. Hasil penilaian kinerja (SKP) dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
	4. Agar dalam penyusunan Laporan Monev Kinerja Bulanan pada periode selanjutnya dapat menyajikan terkait strategi, kebijakan, dan aktivitas dalam mencapai kinerja.	4. Dalam Laporan Kinerja Triwulan BP3KP Kalimantan I dicantumkan strategi dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
Pelaporan Kinerja	1. Agar pada Laporan Kinerja priode berikutnya ringkasan eksekutif dapat menggambarkan capaian kinerja, maupun hal-hal penting lainnya.	1. Telah disajikan data capaian kinerja dan hal-hal penting lainnya dalam ringkasan eksekutif pada Laporan Kinerja 2025 ini;
	2. Agar pada Dokumen Laporan Kinerja dapat menyajikan rekomendasi dan langkah tindak lanjut ke depan untuk penyempurnaan kinerja;	2. Dalam Laporan Kinerja 2025 ini disajikan rekomendasi dan langkah tindak lanjut untuk penyempurnaan kinerja pada Bab IV, Subbab 4.2.
	3. Agar pada Laporan Kinerja dapat dilakukan analisis atas penggunaan sumber daya (perbandingan Sumber Daya Manusia dengan Sarana Prasarana dan Anggaran) dalam mencapai kinerja;	3. Dalam Laporan Kinerja 2025 ini disajikan analisis atas penggunaan sumber daya (perbandingan Sumber Daya Manusia dengan Sarana Prasarana dan Anggaran) dalam mencapai kinerja pada Bab III;
	4. Agar dalam penyusunan Laporan Monev Bulanan berikutnya dapat menyajikan secara rinci tindak lanjut atas permasalahan pada sebelumnya berdasarkan dokumen perencanaan kinerja.	4. Dalam Laporan Kinerja Triwulan BP3KP Kalimantan I disajikan permasalahan dan tindaklanjutnya.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan menuangkan hasilnya dalam Laporan Kinerja.	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti dan dituangkan hasilnya dalam Laporan Kinerja 2025 ini.

3.2. Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I

Laporan Kinerja BP3KP Kalimantan I Tahun 2025 ini berisi hasil pengukuran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan BP3KP Kalimantan I selama periode T.A. 2025 yang merujuk pada sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran yaitu Perjanjian Kinerja dengan status revisi akhir. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh BP3KP Kalimantan I dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah 5 (lima) Unit Organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Kegiatan di lingkungan BP3KP Kalimantan I dilaksanakan dalam rangka mendukung dua program, yaitu :

- 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen.

Khusus Tahun Anggaran 2025 ini, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya melekat pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan, DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan, serta DIPA Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen hanya melekat pada DIPA Sekretariat Jenderal.

3.2.1. Capaian Kinerja terhadap PK Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan I dengan DIPA Sekretariat Jenderal menetapkan satu Sasaran Kegiatan yaitu : “Meningkatnya Dukungan manajemen Sekretariat Jenderal” dengan satu indikator kinerja yaitu “Tingkat Layanan Dukungan Manajemen dan ditetapkan 3 Layanan sebagai target dengan capaian kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025. Rincian Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Sekretariat Jenderal

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Dukungan Manajemen			Layanan	3	3	100
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			Layanan	3	3	100
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	3	3	100
		Satker Balai	Layanan	1	1	100
		Satker PKP Kalbar	Layanan	1	1	100
		Satker PKP Kalteng	Layanan	1	1	100

3.2.2. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan I dengan DIPA Ditjen Kawasan Permukiman menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu : 1) “Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah

layak huni”; 2) “Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman”; 3) “Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu” dengan masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025 dengan rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Ditjen Kawasan Permukiman

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			Laporan, Rekomendasi Kebijakan, Unit, Hektar	1303.02	1303.02	100
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			Laporan, Rekomendasi Kebijakan, Unit, Hektar	1303.02	1303.02	100
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	100
		Satker Balai	Laporan	1	1	100
		2 Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
		Satker Balai	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	2	2	100
		Satker Balai	Laporan	1	1	100
		Satker PKP Kalbar	Laporan	1	1	100
		4 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1279	1279	100
		Satker PKP Kalbar	Unit	1279	1279	100
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	5 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	20.02	20.02	100
		Satker PKP Kalbar	Hektar	19.92	19.92	100
		Satker PKP Kalteng	Hektar	0.1	0.1	100

3.2.3. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan I dengan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu : 1) “Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan”; 2) “Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan”; 3) “Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan” dengan masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Adapun terdapat target kinerja yang tercapai tidak menyentuh angka maksimal yaitu pada Indikator Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan dengan capaian hanya 99.77%. Hal ini disebabkan adanya deviasi target kinerja sebesar -5 Unit Rumah Swadaya pada unit kerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025, di mana target

ditetapkan 624 unit namun hanya tercapai 619 unit. Sehingga capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan yaitu sebesar 99.77% pada Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Ditjen Perumahan Perdesaan

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			Laporan, Unit	2206	2201	99.77
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			Laporan, Unit	2206	2201	99.77
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100.00
		BP3KP Kalimantan I	Laporan	1	1	100.00
		Satker Kalbar	Laporan	1	1	100.00
		Satker Kalteng	Laporan	1	1	100.00
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	2	100.00
		Satker Kalbar	Laporan	1	1	100.00
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Satker Kalteng	Laporan	1	1	100.00
		3 Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	100.00
		BP3KP Kalimantan I	Kegiatan	1	1	100.00
		4 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	2199	2194	99.77
		Satker Kalbar	Unit	1575	1575	100.00
		Satker Kalteng	Unit	624	619	99.20
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	5 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	1	1	100.00
		Satker Kalbar	Unit	1	1	100.00

3.2.4. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan I dengan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu : 1) “Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan”; 2) “Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan”; 3) “Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan” dengan masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Adapun terdapat target kinerja yang tercapai tidak menyentuh angka maksimal yaitu pada Indikator Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan dengan capaian hanya 99.79%. Hal ini disebabkan adanya deviasi target kinerja sebesar -1 Unit Rumah Swadaya pada unit kerja Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025, di mana target ditetapkan 244 unit namun hanya tercapai 243 unit. Sehingga capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu sebesar 99.81% pada Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Ditjen Perumahan Perkotaan

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				Rekomendasi Kebijakan, Unit	535	534	99.81
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				Rekomendasi Kebijakan, Unit	535	534	99.81
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00
			BP3KP Kalimantan I	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	3	100.00
			BP3KP Kalimantan I	Laporan	1	1	100.00
			Satker Kalbar	Laporan	1	1	100.00
			Satker Kalteng	Laporan	1	1	100.00
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	3	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00
			BP3KP Kalimantan I	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00
		4	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	43	43	100.00
			Satker Kalteng	Unit	43	43	100.00
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	5	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00
			BP3KP Kalimantan I	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00
		6	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	486	485	99.79
			Satker Kalbar	Unit	242	242	100.00
			Satker Kalteng	Unit	244	243	99.59

3.2.5. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Kalimantan I dengan DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menetapkan dua Sasaran Kegiatan yaitu : 1) “Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel”; dan 2) “Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”; dengan masing-masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025, dengan rincian capaian kinerja tersebut yang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja BP3KP Kalimantan I pada PK Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			Rekomendasi Kebijakan	2	2	100.00
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			Rekomendasi Kebijakan	2	2	100.00
1	Meningkatnya dukungan kebijakan	1. Jumlah Kebijakan	Rekomendasi	1	1	100.00

	keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Kebijakan			
			BP3KP Kalimantan I	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00
			BP3KP Kalimantan I	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100.00

3.3. Kinerja Kegiatan Lainnya

Beberapa Pembahasan terkait capaian kinerja lainnya yaitu berkenaan dengan rincian kegiatan utama di wilayah kerja BP3KP Kalimantan I meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah, di antaranya terkait: 1) Realisasi Tindak Lanjut SKB 3 Menteri; 2) Sebaran Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rusun, Penanganan Kumuh, dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah; 3) Capaian Target Layanan Klinik PKP.

3.3.1. Realisasi Tindak Lanjut SKB 3 Menteri

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum telah melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Kebijakan ini lahir untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah dengan menekan beban biaya yang selama ini menjadi hambatan bagi MBR. SKB 3 Menteri terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG adalah langkah strategis untuk mempercepat pencapaian Program Tiga Juta Rumah. Dengan mengurangi beban biaya dan mempercepat perizinan, kebijakan ini memperkuat komitmen pemerintah terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa implikasi dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu dari sisi positif kebijakan ini meningkatkan aksesibilitas rumah layak bagi MBR, memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga negara. Namun dari sisi tantangan perlu pengawasan ketat agar pembebasan BPHTB dan pembebasan retribusi PBG tidak disalahgunakan oleh pihak non-MBR atau pengembang besar.

Berkenaan dengan kebijakan tersebut, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari wilayah kerja BP3KP Kalimantan I telah melaksanakan implementasi kebijakan tersebut dalam bentuk telah terbitnya peraturan kepala daerah. Adapun status implementasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8 untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Tabel 3.9. untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator capaian implementasi menggunakan status terbitnya peraturan kepala daerah untuk masing-masing berkaitan dengan pembebasan BPHTB dan Pembebasan Retribusi PBG.

Tabel 3.8 Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

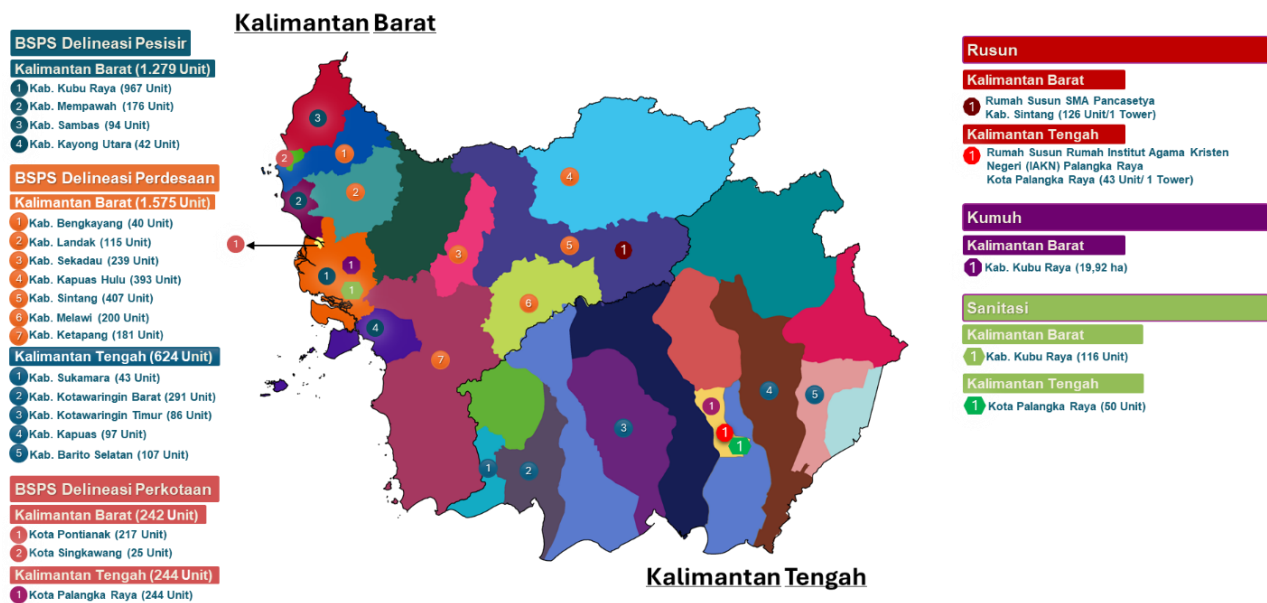
PROVINSI KALIMANTAN BARAT				Status Implementasi
NO.	KABUPATEN/KOTA	PEMBEBASAN BPHTB	PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG	
		Nomor Perkada	Nomor Perkada	
1	PONTIANAK	Perwali No. 44 tanggal 24 Des 2024	Perwali No. 45 tanggal 24 Des 2024	100%
2	SINGKAWANG	Perwali No. 38 tanggal 26 Des 2024	Perwali No. 39 tanggal 26 Des 2024	100%
3	BENGKAYANG	Perbup No. 74 tanggal 9 Des 2024	Perbup No. 75 tanggal 9 Des 2024	100%
4	LANDAK	Perbup No. 26 tanggal 23 Des 2024	Perbup No. 27 tanggal 23 Des 2024	100%
5	SANGGAU	Perbup No. 1 tanggal 2 Jan 2025	Perbup No. 2 tanggal 2 Jan 2025	100%
6	SEKADAU	Perbup No. 72 tanggal 23 Des 2024	Perbup No. 73 tanggal 23 Des 2024	100%
7	SINTANG	Perbup No. 116 tanggal 20 Des 2024	Perbup No. 117 tanggal 20 Des 2024	100%
8	KAPUAS HULU	Perbup No. 2 tanggal 20 Jan 2025	Perbup No. 1 tanggal 20 Jan 2025	100%
9	MELAWI	Perbup No. 1 tanggal 24 Jan 2025	Perbup No. 2 tanggal 24 Jan 2025	100%
10	KETAPANG	Perbup No. 92 tanggal 24 Des 2024	Perbup No. 93 tanggal 24 Des 2024	100%
11	KUBU RAYA	Perbup No. 49 tanggal 31 Des 2024	Perbup No. 1 tanggal 17 Jan 2025	100%
12	MEMPAAH	perbup No. 1 tanggal 8 Jan 2025	Perbup No. 2 tanggal 8 Jan 2025	100%
13	SAMBAS	Perbup No. 71 tanggal 27 Des 2024	Perbup No. 70 tanggal 27 Des 2024	100%
14	KAYONG UTARA	Perbup No. 1 tanggal 22 Jan 2025	Perbup No. 2 tanggal 22 Jan 2025	100%

Tabel 3.9 Tindak Lanjut SKB 3 Menteri di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				Status Implementasi
NO.	KABUPATEN/KOTA	PEMBEBASAN BPHTB	PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG	
		Nomor Perkada	Nomor Perkada	
1	PALANGKA RAYA	Perwali Nomor 47 Tahun 2024	Perwali Nomor 48 Tahun 2024	100%
2	KOTAWARINGIN BARAT	Perbup Nomor 47 Tahun 2024	Perbup Nomor 48 Tahun 2024	100%
3	KOTAWARINGIN TIMUR	Perbup Nomor 54 Tahun 2024	Perbup Nomor 55 Tahun 2024	100%
4	KAPUAS	Perbup Nomor 46 Tahun 2024	Perbup Nomor 45 Tahun 2024	100%
5	PULANG PISAU	Perbup Nomor 33 Tahun 2024	Perbup Nomor 32 Tahun 2024	100%
6	KATINGAN	Perbup Nomor 51 Tahun 2024	Perbup Nomor 50 Tahun 2024	100%
7	GUNUNG MAS	Perbup Nomor 47 Tahun 2024	Perbup Nomor 48 Tahun 2024	100%
8	SERUYAN	Perbup Nomor 38 Tahun 2024	Perbup Nomor 39 Tahun 2024	100%
9	LAMANDAU	Perbup Nomor 13 Tahun 2025	Perbup Nomor 32 Tahun 2025	100%
10	SUKAMARA	Perbup Nomor 45 Tahun 2024	Perbup Nomor 46 Tahun 2024	100%
11	BARITO SELATAN	Perbup Nomor 34 Tahun 2024	Perbup Nomor 35 Tahun 2024	100%
12	BARITO TIMUR	Perbup Nomor 38 Tahun 2024	Perbup Nomor 37 Tahun 2024	100%
13	BARITO UTARA	Perbup Nomor 26 Tahun 2024	Perbup Nomor 27 Tahun 2024	100%
14	MURUNG RAYA	Perbup Nomor 37 Tahun 2024	Perbup Nomor 38 Tahun 2024	100%

3.3.2. Kegiatan BSPS, Pembangunan Rumah Susun, Penanganan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah TA.2025

Gambar 3.1 menampilkan distribusi unit BSPS berdasarkan kategori wilayah—pesisir, perdesaan, dan perkotaan—serta integrasi dengan program pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi. Dari data terlihat bahwa Kalimantan Barat memperoleh alokasi lebih besar, dengan fokus pada kabupaten pedalaman seperti Kapuas Hulu, Sintang, dan Bengkayang, serta kawasan pesisir seperti Kayong Utara dan Kubu Raya. Sementara itu, Kalimantan Tengah mendapat alokasi lebih kecil namun merata di beberapa kabupaten seperti Gunung Mas, Barito Selatan, Barito Timur, dan Seruyan. Kehadiran program rusun, sanitasi, dan penanganan kumuh menunjukkan pendekatan terpadu pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman, tidak hanya melalui pembangunan rumah baru tetapi juga melalui perbaikan lingkungan dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, dokumen ini menggambarkan strategi pembangunan perumahan yang berorientasi pada pemerataan, integrasi lintas sektor, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.



Gambar 3.1 Peta Sebaran Kegiatan BSPS, Pembangunan Rusun, Penanganan Kumuh dan Sanitasi TA.2025 BP3KP Kalimantan I

Kalimantan Barat menjadi penerima bantuan program BSPS terbesar dengan hampir total 3096 unit, sedangkan Kalimantan Tengah mendapat alokasi BSPS lebih kecil yaitu hanya sebesar 868 unit. Kegiatan Penanganan Kumuh hanya ada di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan kegiatan Bantuan sanitasi dilaksanakan di kedua provinsi. Berikut ini adalah rangkuman singkat capaian kegiatan TA.2025 untuk masing-masing kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Kegiatan BSPS Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

Wilayah	Kalimantan Barat			Kalimantan Tengah		
Delineasi	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Pesisir	1.279	1.279	100.00	-	-	-
Perdesaan	1.575	1.575	100.00	624	619	99.20
Perkotaan	242	242	100.00	244	243	99.59
TOTAL	3.096	3.096	100.00	868	862	99.31%

Untuk Wilayah Kalimantan Barat, realisasi pelaksanaan BSPS untuk delineasi Pesisir, Perdesaan, dan Perkotaan masing-masing sebesar 100%. Sedangkan untuk Kalimantan Tengah, kegiatan BSPS hanya ada pada delineasi Perdesaan dan Perkotaan dengan realisasi masing-masing sebesar 99.20% dan 99.59%. Kalimantan Barat memiliki capaian maksimal dibandingkan dengan capaian pada Kalimantan Tengah.

Program BPS di Provinsi Kalimantan Barat mencakup total bantuan 3.096 unit. Pelaksanaan kegiatan tersebar pada tiga wilayah delineasi, yaitu pesisir sebanyak 1.279 unit, perdesaan sebanyak 1.575 unit, serta perkotaan sebanyak 242 unit. Gambar 3.2 menggambarkan visual pelaksanaan program BPS di Wilayah Kalimantan Barat.



Gambar 3.2. Pelaksanaan Program BPS di Wilayah Kalimantan Barat

Program BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah mencakup total bantuan dengan target 868 unit. Pelaksanaan kegiatan tersebar pada dua wilayah delineasi, yaitu perdesaan sebanyak 624 unit, serta perkotaan sebanyak 244 unit. Gambar 3.3 menggambarkan visual pelaksanaan program BSPS di Wilayah Kalimantan Tengah.



Gambar 3.3. Pelaksanaan Program BPS di Wilayah Kalimantan Tengah

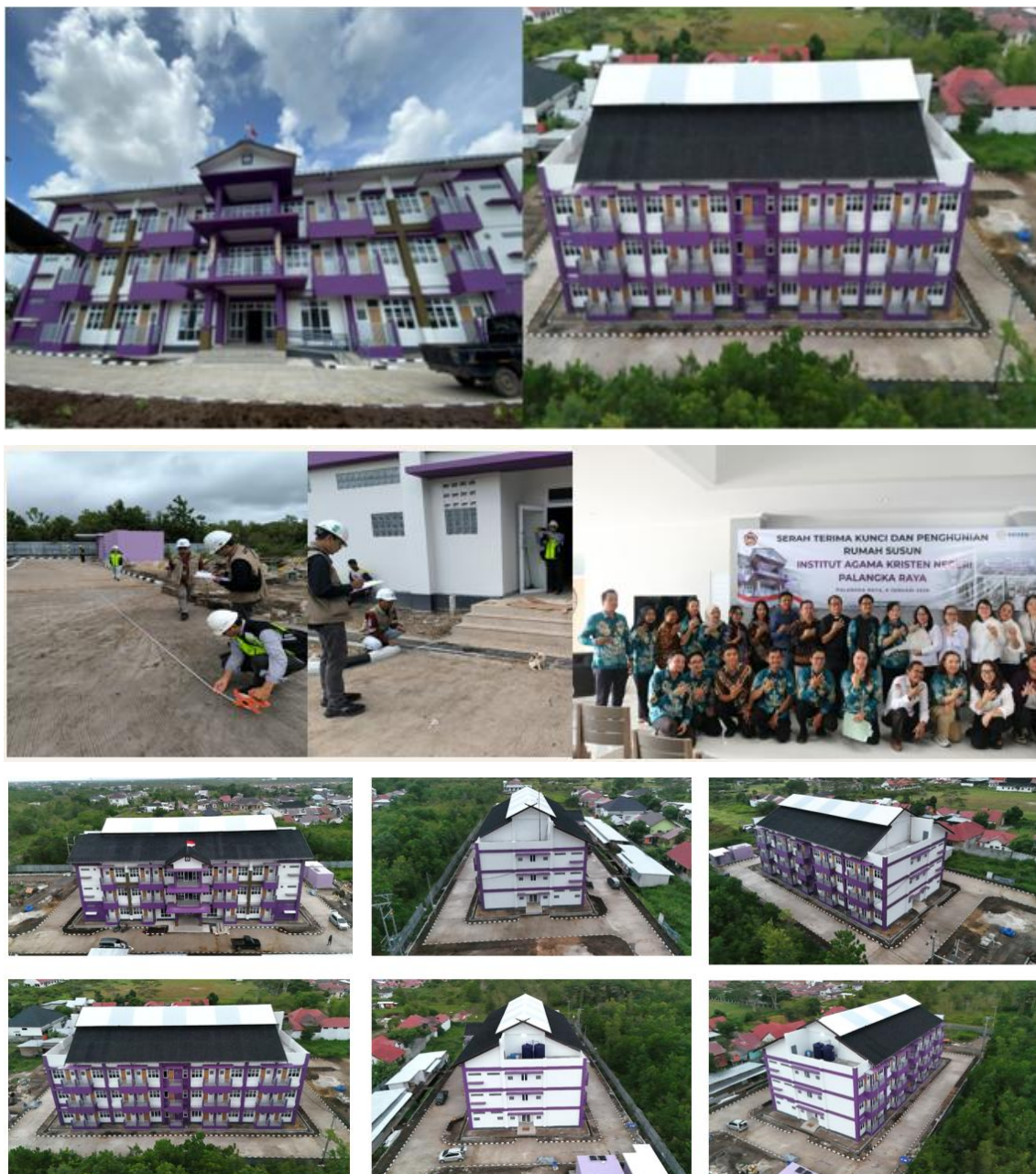
Bantuan Rumah Susun SMA Panca Setya Kalimantan Barat dialokasikan sebesar Rp6.266.434.000, dengan realisasi Rp1.132.025.875 atau 18,06%, untuk pembangunan 1 unit rumah susun berupa 1 tower di SMA Panca Setya, Kalimantan Barat. Progres fisik menunjukkan realisasi 10,39% dari rencana 1,81%, dengan deviasi positif sebesar 8,85%. Kegiatan pembangunan baru mulai berkontrak pada Desember 2025, sehingga diperkirakan terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp4.705.560.000 atau sekitar 75,70% dari pagu.





Gambar 3.4. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun di Wilayah Kalimantan Barat

Bantuan Rumah Susun IAKN Palangka Raya dialokasikan anggaran sebesar 19.872.300.000,- dengan realisasi 19.785.636.882,- atau 99.56%, untuk pembangunan 1 tower / 43 unit rumah susun dengan capaian realisasi progres fisik 100%.



Gambar 3.5. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun di Wilayah Kalimantan Tengah

Bantuan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.088.561.000, dengan realisasi mencapai Rp7.820.352.283 atau 77,52% dari pagu, mencakup luas penanganan $\pm 19,92$ hektar. Kegiatan penanganan kawasan kumuh difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, antara lain melalui pemasangan u-ditch/drainase dan pekerjaan paving, yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, sistem drainase, serta kualitas lingkungan permukiman secara keseluruhan. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan capaian fisik dengan realisasi 75,59% dari rencana 100% sehingga terdapat deviasi sebesar -24,42%.



Gambar 3.6. Kegiatan Penanganan Kumuh di Wilayah Kalimantan Barat

Program Bantuan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.056.920.000. Hingga pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran mencapai Rp1.562.888.841 atau 51,13% dari pagu, dengan jumlah penanganan sebanyak 116 unit. Dari sisi fisik, pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100%, sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Program ini difokuskan pada penyediaan sarana sanitasi layak bagi masyarakat, guna meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang sehat, aman, dan memenuhi standar lingkungan. Penyelesaian kegiatan secara penuh diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran.



Gambar 3.7. Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Wilayah Kalimantan Barat

BANTUAN SANITASI KALIMANTAN BARAT

Alokasi Anggaran:
Rp. 3.056.920.000
Realisasi Keuangan:
1.562.888.841
– 51.13%

Kab Kubu Raya / 116 Unit

Rencana: 100%
Realisasi: 100%

Jumlah Unit Bantuan:
Desa Teluk Kapuas (28 Unit)
Desa Parit Baru (34 Unit)
Desa Arang Limbung (47 Unit)
Desa Sungai Raya (7 Unit)

Dokumentasi Kegiatan



Alokasi Anggaran:
Rp. 688.502.000
Realisasi Keuangan:
Rp. 653.174.362
– 94.87%

Alokasi Unit
50 Unit

Uraian Kegiatan

Lokasi : Kelurahan Palangka, Jalan Pelatuk

Rencana: 100%
Realisasi: 100%

Tahapan Pelaksanaan:
1. Survey dan Perencanaan Teknis
2. Penyusunan Daftar Kebutuhan Pekerjaan
3. Sosialisasi & Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
4. Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja
5. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi & Sanitasi
6. Test Commissioning
7. Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan
8. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3.8. Status Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Wilayah Kalimantan Barat

3.3.3. Layanan Klinik PKP

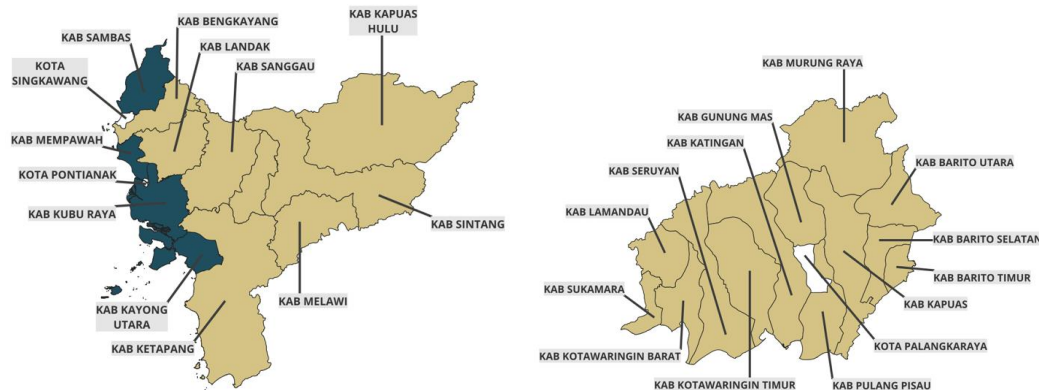
Layanan Klinik PKP adalah pusat layanan terpadu yang memberikan informasi, bantuan teknis, dan pendampingan terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman layak huni. Klinik ini hadir untuk mendukung masyarakat, khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), agar dapat mengakses hunian yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Ruang lingkup layanan Klinik PKP yaitu:

- 1) Perencanaan Rumah, untuk memberikan konsultasi terkait desain, penyusunan RAB, proses perizinan (PBG), serta aspek teknis perencanaan rumah.
- 2) Pelaksanaan Konstruksi, untuk membantu masyarakat dalam pemilihan material, penentuan tenaga kerja/tukang, serta aspek teknis pelaksanaan pembangunan.
- 3) Pengawasan Konstruksi, untuk memberikan pendampingan dalam pengawasan pembangunan atau perbaikan rumah agar sesuai standar.
- 4) Pemanfaatan Rumah, yaitu layanan terkait pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan rumah agar tetap layak huni.

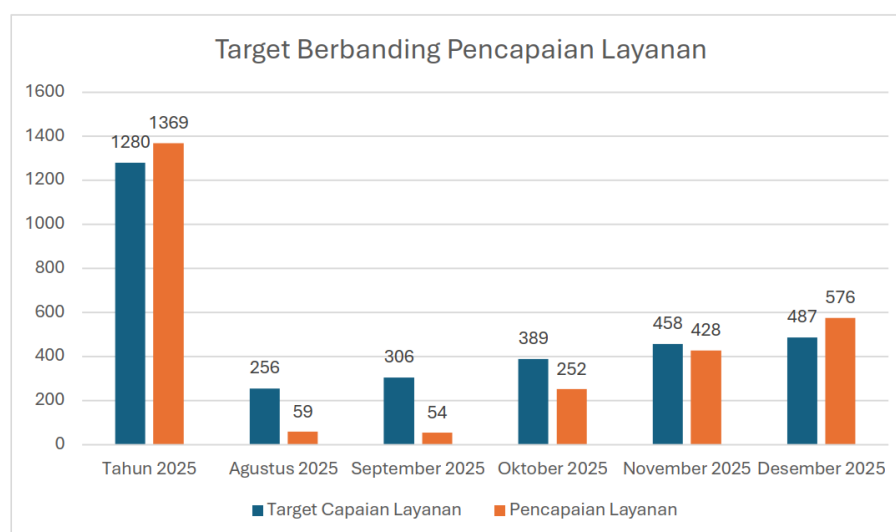
- 5) Pendampingan Sosial dan Teknis, untuk membantu masyarakat secara individu maupun kelompok dalam memahami konsep rumah layak huni yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tujuan Klinik PKP yaitu mengukur kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak huni dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan perumahan, meningkatkan keswadayaan masyarakat melalui program pendampingan dan pemberian bantuan teknis, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Singkatnya, Klinik PKP berfungsi sebagai “one-stop service” bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, pendampingan, dan solusi teknis terkait perumahan dan permukiman, sehingga dapat memperkuat akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Target capaian tahun 2025 adalah terlaksananya layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (Klinik PKP) secara rutin setiap bulan dengan peningkatan jumlah penerima layanan serta terselesaikannya pengaduan/konsultasi masyarakat dengan tuntas sesuai standar waktu layanan dengan angka pencapaian 1.280 layanan. Berdasarkan kinerja yang telah dilaksanakan, capaian kinerja adalah 1.369 layanan atau sebesar 106.95%, dengan kata lain capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.



Gambar 3.9 Peta Sebaran Layanan Klinik PKP Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

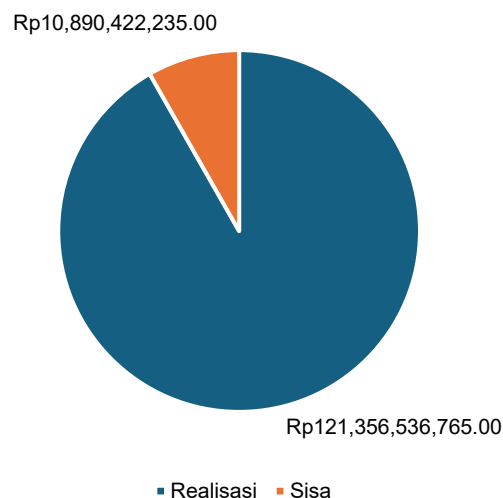


Gambar 3.10 Diagram Target dan Capaian Layanan Klinik PKP periode Agustus-Desember 2025

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1. Realisasi Anggaran pada Unit Kerja BP3KP Kalimantan I

Berkenaan dengan realisasi pelaksanaan anggaran per satuan kerja di lingkungan BP3KP Kalimantan I (lihat Tabel 3.11) mencakup Satker Balai, Satker PKP Kalimantan Barat, dan Satker PKP Kalimantan Tengah. Satker PKP Kalimantan Tengah lebih unggul karena memiliki tingkat penyerapan paling tinggi untuk DIPA Sekretariat Jenderal sebesar 91.55%, Ditjen Kawasan Permukiman sebesar 95.68%, Ditjen Perumahan Perdesaan sebesar 99.63%, dan Ditjen Perumahan Perkotaan sebesar 99.02%. Secara keseluruhan total realisasi anggaran pada BP3KP Kalimantan I yaitu sebesar 91.77% atau sebesar Rp 121.356.536.765,- dari total pagu Rp132.246.959.000,- (dapat juga dilihat pada Gambar 3.11.)



Gambar 3.11 Diagram Realisasi Pelaksanaan Anggaran BP3KP Kalimantan I

Tabel 3.11 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per Satuan Kerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I

NO	KODE	SATUAN KERJA	UNOR	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	691409	Balai	SETJEN	1.073.888.000	945.223.300	88.02
2	691410	PKP Kalbar	SETJEN	617.919.000	536.850.044	86.88
3	691411	PKP Kalteng	SETJEN	660.469.000	604.650.268	91.55
4	691463	Balai	DITJEN K.P.	535.508.000	341.717.900	63.81
5	691464	PKP Kalbar	DITJEN K.P.	41.151.876.000	37.066.150.056	90.07
6	691465	PKP Kalteng	DITJEN K.P.	688.502.000	658.773.862	95.68
7	691517	Balai	DITJEN PERUM. PERDESAAN	498.538.000	324.809.200	65.15
8	691518	PKP Kalbar	DITJEN PERUM. PERDESAAN	40.142.318.000	35.001.304.025	87.19
9	691519	PKP Kalteng	DITJEN PERUM. PERDESAAN	13.795.471.000	13.744.932.703	99.63
10	691571	Balai	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	1.181.193.000	798.687.500	67.62
11	691572	PKP Kalbar	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	5.803.449.000	5.520.991.900	95.13
12	691573	PKP Kalteng	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	25.794.362.000	25.541.820.807	99.02
13	691606	Balai	DITJEN TKPR	303.466.000	270.625.200	89.18
TOTAL				132.246.959.000	121.356.536.765	91,77

Sumber : Realisasi Pelaksanaan Anggaran, MyPKP 2025

DIPA pada BP3KP Kalimantan I di bawah Sekretariat Jenderal mencakup DIPA pada satker Balai 691409, Satker PKP Kalbar 691410, dan Satker PKP Kalteng 691411, dengan total pagu Rp 2.352.276.000,- (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 2.086.723.612 (Dua Miliar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) atau sebesar 88.71%. Dari

tiga satker tersebut, Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki progres keuangan tertinggi yaitu sebesar 91.55%. Adapun rincian besaran nilai pagu dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 BP3KP Kalimantan I DIPA Sekretariat Jenderal

No.	Kode Satker	Satker	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keu
			(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	691409	Balai	1,073,888,000	945,223,300	88.02
2	691410	Satker PKP Kalbar	617,919,000	536,850,044	86.88
3	691411	Satker PKP Kalteng	660,469,000	604,650,268	91.55
TOTAL			2,352,276,000	2,086,723,612	88.71

DIPA pada BP3KP Kalimantan I di bawah Ditjen Kawasan Permukiman mencakup DIPA pada satker Balai 691463, Satker PKP Kalbar 691464, dan Satker PKP Kalteng 691465, dengan total pagu Rp 42.375.886.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 38.066.641.818 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) atau sebesar 89.83%. Dari tiga satker tersebut, Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki progres keuangan tertinggi yaitu sebesar 95.68%. Adapun rincian besaran nilai pagu dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 BP3KP Kalimantan I DIPA Ditjen Kawasan Permukiman

No.	Kode Satker	Satker	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keu
			(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	691463	Balai	535,508,000	341,717,900	63.81
2	691464	Satker PKP Kalbar	41,151,876,000	37,066,150,056	90.07
3	691465	Satker PKP Kalteng	688,502,000	658,773,862	95.68
TOTAL			42,375,886,000	38,066,641,818	89.83

DIPA pada BP3KP Kalimantan I di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan mencakup DIPA pada satker Balai 691517, Satker PKP Kalbar 691518, dan Satker PKP Kalteng 691519, dengan total pagu Rp 54.436.327.000,- (Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 49.071.045.928 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 90.14%. Dari tiga satker tersebut, Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki progres keuangan tertinggi yaitu sebesar 99.63%. Adapun rincian besaran nilai pagu dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 BP3KP Kalimantan I DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

No.	Kode Satker	Satker	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keu
			(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	691517	Balai	498,538,000	324,809,200	65.15
2	691518	Satker PKP Kalbar	40,142,318,000	35,001,304,025	87.19
3	691519	Satker PKP Kalteng	13,795,471,000	13,744,932,703	99.63
TOTAL			54,436,327,000	49,071,045,928	90.14

DIPA pada BP3KP Kalimantan I di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan mencakup DIPA pada satker Balai 691571, Satker PKP Kalbar 691572, dan Satker PKP Kalteng 691573, dengan total pagu Rp 32.779.004.000,- (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 31.861.500.207 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) atau sebesar 97.20%. Dari tiga satker tersebut, Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki progres keuangan tertinggi yaitu sebesar 99.02%. Adapun rincian besaran nilai pagu dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 BP3KP Kalimantan I DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

No.	Kode Satker	Satker	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keu
			(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	691571	Balai	1,181,193,000	798,687,500	67.62
2	691572	Satker PKP Kalbar	5,803,449,000	5,520,991,900	95.13
3	691573	Satker PKP Kalteng	25,794,362,000	25,541,820,807	99.02
TOTAL			32,779,004,000	31,861,500,207	97.20

DIPA pada BP3KP Kalimantan I di bawah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mencakup DIPA hanya pada satker Balai 691606 dengan total pagu Rp 303.466.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp 270.625.200 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 89.18% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16 BP3KP Kalimantan I DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Kode Satker	Satker	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keu
			(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	691606	Balai	303,466,000	270,625,200	89.18
2	-	Satker PKP Kalbar	-	-	-
3	-	Satker PKP Kalteng	-	-	-
TOTAL			303,466,000	270,625,200	89.18

3.4.2. Rincian Realisasi Anggaran pada Satker Balai

Pembahasan mengenai analisis realisasi anggaran BP3KP Kalimantan I dalam hal ini difokuskan pada DIPA yang berada pada satker Balai. Adapun DIPA yang digunakan sebagai bahan analisis tersebut menggunakan DIPA revisi terakhir. Terdapat lima DIPA yaitu dengan dengan kode satker 691409, 691463, 691517, 691571, dan 691606. Masing-masing DIPA memiliki nilai pagu yang berbeda dengan karakteristik jumlah realisasi keuangan masing-masing. Berikut ini adalah pembahasan mengenai realisasi anggaran pada masing-masing DIPA.

DIPA Sekretariat Jenderal dengan kode satker 691409 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp 1.073.888.000,- (Satu Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 945.223.300,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 88.02%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Sekretariat Jenderal (691409)

KODE	SATKER/ PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA(Rp)
691409	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	1.073.888.000	945.223.300	88,02	128.664.700
WA	Program Dukungan Manajemen	1.073.888.000	945.223.300	88,02	128.664.700
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1.073.888.000	945.223.300	88,02	128.664.700
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	1.073.888.000	945.223.300	88,02	128.664.700
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.073.888.000	945.223.300	88,02	128.664.700
7665.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.073.888.000	945.223.300	88,02	128.664.700
7665.EBA.994.002.A	Operasional dan pemeliharaan kantor	401.191.000	333.641.500	83,16	67.549.500
7665.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	46.800.000	45.226.700	96,64	1.573.300
7665.EBA.994.002.C	Pemeliharaan sarana dan prasarana	205.873.000	204.459.100	99,31	1.413.900
7665.EBA.994.002.D	Honor operasional satuan kerja	420.024.000	361.896.000	86,16	58.128.000

Sumber : Progres Keuangan, MyPKP 2025

DIPA Ditjen Kawasan Permukiman dengan kode satker 691463 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp 535.508.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 341.717.900,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 63.81%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691463)

KODE	SATKER/ PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
691463	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	535.508.000	341.717.900	63,81	193.790.100
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	535.508.000	341.717.900	63,81	193.790.100

7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	535.508.000	341.717.900	63,81	193.790.100
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	485.508.000	303.664.900	62,55	181.843.100
7659.FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	155.208.000	111.490.200	71,83	43.717.800
7659.FAE.001.100	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	155.208.000	111.490.200	71,83	43.717.800
7659.FAE.001.100.A	Pemantauan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	155.208.000	111.490.200	71,83	43.717.800
7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	330.300.000	192.174.700	58,18	138.125.300
7659.FAE.003.100	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	330.300.000	192.174.700	58,18	138.125.300
7659.FAE.003.100.A	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan	330.300.000	192.174.700	58,18	138.125.300
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]	50.000.000	38.053.000	76,11	11.947.000
7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000	38.053.000	76,11	11.947.000
7659.PBF.001.100	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000	38.053.000	76,11	11.947.000
7659.PBF.001.100.A	Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	50.000.000	38.053.000	76,11	11.947.000

Sumber : Progres Keuangan, MyPKP 2025

DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan dengan kode satker 691517 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp 498.538.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 324.809.200,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 65.15%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691517)

KODE	SATKER/ PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
691517	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	498.538.000	324.809.200	65,15	173.728.800
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	498.538.000	324.809.200	65,15	173.728.800
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	498.538.000	324.809.200	65,15	173.728.800
7660.AEA	Koordinasi (kegiatan)	316.684.000	229.149.600	72,36	87.534.400
7660.AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	316.684.000	229.149.600	72,36	87.534.400
7660.AEA.001.100	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	316.684.000	229.149.600	72,36	87.534.400
7660.AEA.001.100.A	Pembinaan penyelenggaraan PKP	102.669.000	54.265.200	52,85	48.403.800
7660.AEA.001.100.B	Monitoring dan Evaluasi	179.503.000	143.710.400	80,06	35.792.600

	Penyelenggaraan Perumahan				
7660.AEA.001.100.C	Pendataan pembangunan/renovasi rumah	34.512.000	31.174.000	90,33	3.338.000
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	181.854.000	95.659.600	52,60	86.194.400
7660.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	181.854.000	95.659.600	52,60	86.194.400
7660.FAE.005.100	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	181.854.000	95.659.600	52,60	86.194.400
7660.FAE.005.100.A	Pemantauan dan Evaluasi BSPS	181.854.000	95.659.600	52,60	86.194.400

Sumber : Progres Keuangan, MyPKP 2025

DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan dengan kode satker 691571 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp 1.181.193.000,- (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 798.687.500,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 67.62%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691571)

KODE	SATKER/ PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
691571	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	1.181.193.000	798.687.500	67,62	382.505.500
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.181.193.000	798.687.500	67,62	382.505.500
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.181.193.000	798.687.500	67,62	382.505.500
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	901.302.000	622.822.100	69,10	278.479.900
7661.ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	387.597.000	331.408.300	85,50	56.188.700
7661.ABF.001.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan dan Strategi, serta Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	387.597.000	331.408.300	85,50	56.188.700
7661.ABF.001.100.A	Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan perumahan perkantoran pusat dan daerah	387.597.000	331.408.300	85,50	56.188.700
7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	203.887.000	126.430.400	62,01	77.456.600
7661.ABF.004.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	203.887.000	126.430.400	62,01	77.456.600
7661.ABF.004.100.A	Penyusunan dan pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan perumahan perkotaan	203.887.000	126.430.400	62,01	77.456.600
7661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	309.818.000	164.983.400	53,25	144.834.600
7661.ABF.005.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	309.818.000	164.983.400	53,25	144.834.600
7661.ABF.005.100.A	Verifikasi bantuan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	309.818.000	164.983.400	53,25	144.834.600
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta	279.891.000	175.865.400	62,83	104.025.600

	Pelaporan (Laporan, Layanan)				
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	279.891.000	175.865.400	62,83	104.025.600
7661.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	279.891.000	175.865.400	62,83	104.025.600
7661.FAE.001.100.A	Verifikasi bantuan pembangunan perumahan perkotaan	279.891.000	175.865.400	62,83	104.025.600

Sumber : Progres Keuangan, MyPKP 2025

DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan kode satker 691606 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp 303.466.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 270.625.200,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 89.18%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Balai pada DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691606)

KODE	SATKER/ PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU (Rp)	REALISASI(Rp)	% KEU	SISA (Rp)
691606	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	303.466.000	270.625.200	89,18	32.840.800
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	303.466.000	270.625.200	89,18	32.840.800
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	303.466.000	270.625.200	89,18	32.840.800
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	303.466.000	270.625.200	89,18	32.840.800
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129.233.000	112.637.500	87,16	16.595.500
7662.ABF.004.100	Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129.233.000	112.637.500	87,16	16.595.500
7662.ABF.004.100.D	Pembangunan zona integritas Balai P3KP	129.233.000	112.637.500	87,16	16.595.500
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	174.233.000	157.987.700	90,68	16.245.300
7662.ABF.005.100	Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko	174.233.000	157.987.700	90,68	16.245.300
7662.ABF.005.100.A	Penerapan manajemen risiko	174.233.000	157.987.700	90,68	16.245.300

Sumber : Progres Keuangan, MyPKP 2025

3.5. Analisis Perbandingan Kinerja

Pembahasan mengenai analisis perbandingan kinerja meliputi perbandingan kinerja 2025 terhadap unit kerja BP3KP lainnya dan perbandingan kinerja 2025 terhadap dokumen Rencana Strategis 2025-2029 BP3KP Kalimantan I.

3.5.1. Analisis Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Unit Kerja BP3KP Lainnya

Dalam pembahasan ini, BP3KP Kalimantan I mencoba melakukan analisis perbandingan kinerja terhadap BP3KP Sumatera III dan BP3KP Kalimantan II dalam hal realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu yang dimiliki oleh masing-masing balai untuk tahun anggaran 2025.

Pada Tabel 3.22 dapat dilihat realisasi pelaksanaan anggaran per satuan kerja BP3KP Kalimantan II yang mencakup Satker Balai, Satker PKP Kaltim, Satker PKP Kalsel, Satker PKP Kaltara, dan Satker PKP IKN. Kemudian pada Tabel 3.23 dapat dilihat realisasi pelaksanaan anggaran per satuan kerja BP3KP Sumatera III yang mencakup anggaran Satker Balai, Satker PKP Sumbar, Satker PKP Riau, dan Satker PKP Kepri. masing-masing berikut dengan rincian besaran pagu hingga realisasi dan persentase keuangan yang dikelompokkan per DIPA di bawah unit organisasi.

Tabel 3.22 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per Satuan Kerja TA.2025 BP3KP Kalimantan II

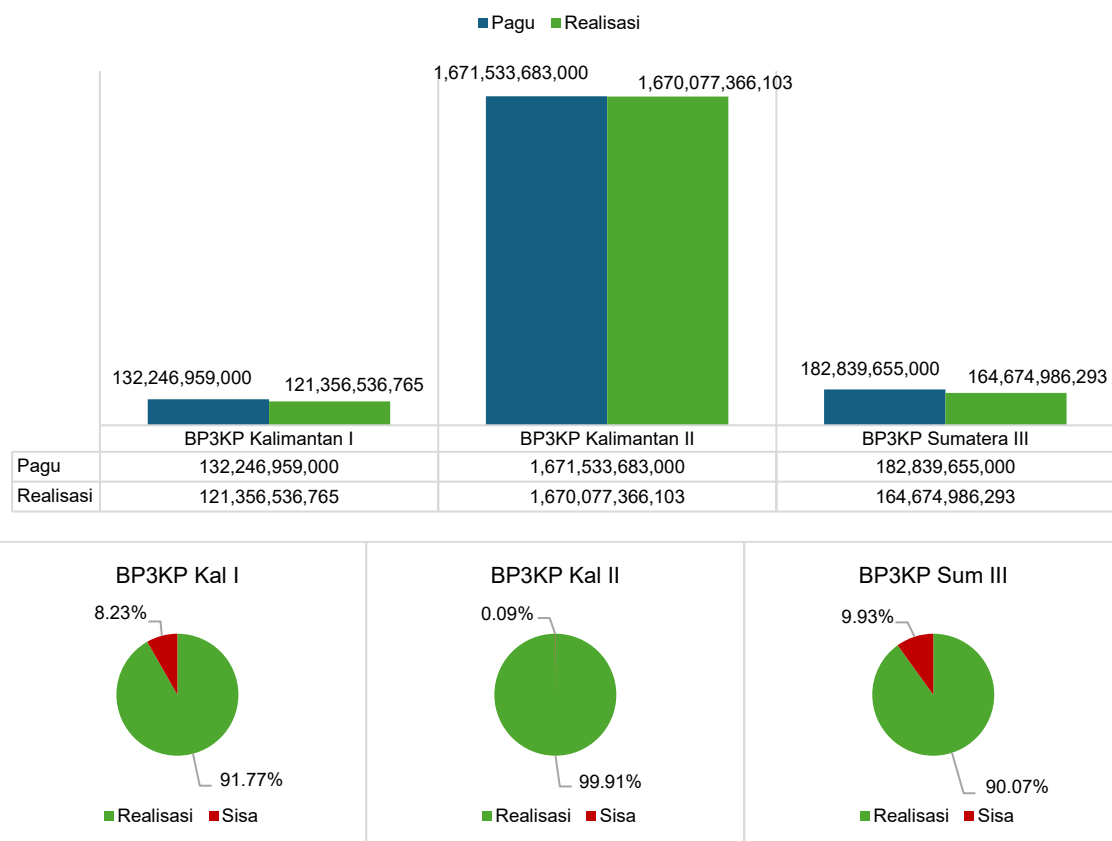
NO	KODE	SATUAN KERJA	UNOR	PAGU	REALISASI	%	SISA
1	691412	Balai	SETJEN	1.470.197.000	1.451.572.992	98,73	18.624.008
2	691413	PKP Kaltim	SETJEN	591.394.000	589.170.806	99,62	2.223.194
3	691414	PKP Kalsel	SETJEN	647.904.000	634.647.254	97,95	13.256.746
4	691415	PKP Kaltara	SETJEN	788.090.000	750.116.245	95,18	37.973.755
5	691416	PKP IKN	SETJEN	1.124.712.000	1.122.112.222	99,77	2.599.778
6	691466	Balai	DITJEN K.P.	465.126.000	464.560.000	99,88	566.000
7	691467	PKP Kaltim	DITJEN K.P.	2.088.985.000	2.072.566.866	99,21	16.418.134
8	691468	PKP Kalsel	DITJEN K.P.	2.432.516.000	2.361.411.627	97,08	71.104.373
9	691469	PKP Kaltara	DITJEN K.P.	1.058.132.000	1.058.128.800	100,00	3.200
10	691520	Balai	DITJEN PERUM. PERDESAAN	626.466.000	616.327.100	98,38	10.138.900
11	691521	PKP Kaltim	DITJEN PERUM. PERDESAAN	7.106.155.000	7.084.414.000	99,69	21.741.000
12	691522	PKP Kalsel	DITJEN PERUM. PERDESAAN	912.870.000	875.883.362	95,95	36.986.638
13	691523	PKP Kaltara	DITJEN PERUM. PERDESAAN	140.171.000	130.439.400	93,06	9.731.600
14	691574	Balai	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	1.291.222.000	1.263.783.649	97,88	27.438.351
15	691575	PKP Kaltim	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	31.661.076.000	31.623.379.924	99,88	37.696.076
16	691576	PKP Kalsel	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	7.438.518.000	7.373.935.154	99,13	64.582.846
17	691577	PKP Kaltara	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	515.069.000	507.783.432	98,59	7.285.568
18	691578	PKP IKN	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	1.610.871.614.000	1.609.806.457.020	99,93	1.065.156.980
19	691607	Balai	DITJEN TKPR	303.466.000	290.676.250	95,79	12.789.750
TOTAL				1.671.533.683.000	1.670.077.366.103	99,91	1.456.316.897

Tabel 3.23 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per Satuan Kerja TA.2025 BP3KP Sumatera III

NO	KODE	SATUAN KERJA	UNOR	PAGU	REALISASI	%	SISA
1	691383	Balai	SETJEN	1.353.194.000	1.174.225.182	86,77	178.968.818
2	691384	PKP Sumbar	SETJEN	741.375.000	724.077.818	97,67	17.297.182
3	691385	PKP Riau	SETJEN	703.514.000	671.616.249	95,47	31.897.751
4	691386	PKP Kepri	SETJEN	654.112.000	641.673.504	98,10	12.438.496
5	691437	Balai	DITJEN K.P.	495.320.000	464.836.914	93,85	30.483.086
6	691438	PKP Sumbar	DITJEN K.P.	19.675.454.000	16.241.429.336	82,55	3.434.024.664
7	691439	PKP Riau	DITJEN K.P.	8.899.434.000	8.660.722.078	97,32	238.711.922
8	691440	PKP Kepri	DITJEN K.P.	713.986.000	686.972.775	96,22	27.013.225
9	691491	Balai	DITJEN PERUM. PERDESAAN	546.356.000	365.376.155	66,88	180.979.845
10	691492	PKP Sumbar	DITJEN PERUM. PERDESAAN	85.492.615.000	73.670.823.717	86,17	11.821.791.283
11	691493	PKP Riau	DITJEN PERUM. PERDESAAN	8.535.521.000	8.526.957.938	99,90	8.563.062
12	691494	PKP Kepri	DITJEN PERUM. PERDESAAN	66.198.000	8.081.594	12,21	58.116.406

13	691545	Balai	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	1.141.227.000	818.778.616	71,75	322.448.384
14	691546	PKP Sumbar	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	4.724.051.000	4.585.927.478	97,08	138.123.522
15	691547	PKP Riau	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	21.365.864.000	21.295.787.726	99,67	70.076.274
16	691548	PKP Kepri	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	27.427.968.000	25.848.025.640	94,24	1.579.942.360
17	691597	Balai	DITJEN TKPR	303.466.000	289.673.573	95,46	13.792.427
TOTAL				182.839.655.000	164.674.986.293	90,07	18.164.668.707,00

Berdasarkan data pada Tabel 3.11, Tabel 3.22, dan Tabel 3.23 dapat dibuat suatu analisis perbandingan realisasi pelaksanaan anggaran antara BP3KP Kalimantan I dan BP3KP Sumatera III yang kemudian dibuat grafik perbandingan realisasi pelaksanaan anggaran sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.12. Di antara ketiga balai (termasuk BP3KP Kalimantan I), BP3KP Kalimantan II memiliki anggaran terbesar yang menyentuh 1.67 triliun dan memiliki capaian realisasi yang lebih unggul (99.91%) hampir mendekati 100% jika dibandingkan BP3KP Kalimantan I dan Sumatera III. BP3KP Kalimantan I memiliki pagu 132 miliar dengan capaian realisasi keuangan yang lebih unggul sebesar 91.77% dibandingkan BP3KP Sumatera III dengan pagu 182 miliar dan realisasi 90.07%. Meskipun demikian, BP3KP Kalimantan I dan Sumatera III keduanya memiliki capaian realisasi keuangan yang cukup baik di atas 90% walaupun belum menyentuh angka maksimal 100%.



Gambar 3.12 Grafik Perbandingan Komposisi Pagu (atas) dan Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran (bawah) BP3KP Kalimantan I, BP3KP Kalimantan II, dan BP3KP Sumatera III

3.5.2. Analisis Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Renstra

Dalam subbab ini disajikan analisis perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target kinerja Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Unit Kerja X. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara target dan realisasi sebagai dasar evaluasi perbaikan kinerja. Perbandingan dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari tingkat *Output* Kegiatan. Hasil analisis pada setiap *output* selanjutnya diakumulasikan untuk memperoleh gambaran capaian pada tingkat Sasaran Kegiatan, Kegiatan, Sasaran Program, hingga Program. Melalui pendekatan ini dapat diketahui besaran selisih (kesenjangan) serta persentase capaian pada setiap level kinerja, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Rincian hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Perbandingan Kinerja 2025 terhadap Renstra

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT KEGIATAN		2025				
		SATUAN	TARGET	REALISASI	SELISIH (GAP)	% CAPAIAN
PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan, Unit	3,061	4,041	980	132.02%
Sasaran Program:	Meningkatnya Hunian Layak	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	3,044	4,019	975	132.03%
K 1	Penyelenggaraan Sistem dan strategi	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	7	8	1	114.29%
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Kegiatan	7	8	1	114.29%
OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	100.00%
OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	-	0	-
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	3	1	-2	33.33%
OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	-	0	-
OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	1	0	100.00%
OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-
OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	0	-
OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	2	2	0	100.00%
OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-
OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	3	3	N/A
K 2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-
SK 2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Unit, Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-
OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	-	0	-
OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	0	-
OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	-	-	0	-
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	0	-
OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	0	-
OK 6	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	-	0	-
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-

K 3	Penyediaan Rumah Layak Huni	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	3,037	4,011	974	132.07%
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Unit, Laporan, Rekomendasi Kebijakan	3,037	4,011	974	132.07%
OK 1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	3,016	3,958	942	131.23%
OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	-	0	-
OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	16	44	28	275.00%
OK 4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan	-	-	0	-
OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	2	2	0	100.00%
OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	2	2	N/A
OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-
OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	0	-
OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	3	3	0	100.00%
OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	N/A
OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	N/A
K 4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-
SK 4	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-
OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-
Sasaran Program:	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	15.00	20.02	5	133.47%
K 1	Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	15.00	20.02	5	133.47%
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	15.00	20.02	5	133.47%
OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	15.00	20.02	5	133.47%
Sasaran Program:	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	2	2	0	100.00%
K 1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	2	2	0	100.00%
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Laporan	-	-	0	-
OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	-	0	-
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	100.00%
OK 1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	100.00%
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	100.00%
OK 1	Jumlah Penerapan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	100.00%
OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyupaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	0	-
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN	Layanan	9	3	-6	33.33%
Sasaran Program:	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Layanan	9	3	-6	33.33%
K 1	Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Layanan	9	3	-6	33.33%
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Layanan	9	3	-6	33.33%
OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	3	0	100.00%
OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	-	-3	0.00%
OK 3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	-	0	-
OK 4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	0	-
OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	0	-
OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	3	-	-3	0.00%
OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	-	0	-
OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	-	0	-
OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	0	-
OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	-	0	-
OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	0	-
OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	-	0	-

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, target Renstra Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 3.061 Rekomendasi Kebijakan/Dokumen/Laporan/Kegiatan/Unit, dengan realisasi mencapai 4.041 Rekomendasi Kebijakan/Dokumen/Laporan/Kegiatan/Unit. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar 980 Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/ Laporan/Kegiatan/Unit, atau capaian kinerja sebesar 132,02% terhadap target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada Tahun 2025 telah melampaui target Renstra. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja program.

Sementara itu, pada Program Dukungan Manajemen, target Renstra Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 9 Layanan, dengan realisasi sebesar 3 Layanan. Hal ini menghasilkan selisih negatif sebesar 6 Layanan atau tingkat capaian sebesar 33,33%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Tahun 2025 untuk program dimaksud masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya pencapaian, baik yang bersifat internal maupun eksternal, guna menjadi dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana, dan Anggaran.

3.6.1. Analisis atas SDM

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah baik pusat dan daerah diperlukan pembaharuan dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal kelembagaan, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan. Dalam kaitannya dengan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan Pendidikan, serta penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebagai unit organisasi koordinator utama bagian dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal Perumahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2025, sebagai kementerian baru, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan 6 (enam) unit kerja eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Terdapat 19 Balai dan meliputi 38 Satuan Kerja sebagai unit pelaksana teknis.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi tersebut, terdapat jabatan-jabatan baru hasil pengumpulan informasi melalui analisis jabatan. Pada tingkat struktural terdapat

jabatan-jabatan struktural baru seperti Kepala Balai, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Jabatan-jabatan dimaksud diharapkan dapat secara maksimal memberikan manfaat dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan khususnya pada 19 Balai yang didalamnya mencakup 38 Provinsi.

3.6.2. Analisis atas Sarana dan Prasarana, serta Anggaran

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, selama berjalannya tahun anggaran 2025, Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I selalu memanfaatkan kemudahan teknologi dalam hal rapat koordinasi baik di dalam lingkungan Direktorat teknis maupun bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan untuk rapat secara daring yaitu menggunakan aplikasi Zoom Workspace dan/atau aplikasi Microsoft Teams. Penggunaan sumber daya sarana/prasarana ini sangat membantu dalam efisiensi penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang digunakan dapat diarahkan untuk kegiatan yang lebih terarah dan lebih optimal.

Beberapa kegiatan rapat secara daring (virtual) yang sudah dilaksanakan dalam rangka efisiensi penggunaan sarana/prasarana dan/atau anggaran sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya di antaranya yaitu:

- 1) Sosialisasi Peraturan Menteri PKP berkaitan dengan Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, serta yang berkaitan dengan kegiatan teknik maupun non-teknis lainnya;
- 2) Sosialisasi Penggunaan e-office dan Presensi yang dilaksanakan oleh Pusdatin Setjen.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA pada masing-masing Unit Organisasi;
- 4) Bimbingan Teknis berkaitan dengan persiapan pembekalan TFL program BSPS;
- 5) Bimbingan Teknis berkaitan dengan pelaksanaan *Qualitative Scoring* persiapan maupun pasca pelaksanaan pembangunan Rumah Susun;
- 6) Rapat Koordinasi Internal Persiapan Pembangunan Zona Integritas BP3KP Kalimantan I;
- 7) Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Risiko;
- 8) Pelaksanaan Pelatihan Analisis Manajemen Risiko secara daring sebelum dilaksanakan Ujian Sertifikasi;
- 9) Rapat secara *hybrid* (daring dan luring) dalam hal sosialisasi FLPP dan KPP dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah, maupun kegiatan lainnya;
- 10) Rapat Koordinasi Likuidasi BMN ex Direktorat Jenderal Perumahan;
- 11) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Wasdal BMN;
- 12) Pelatihan secara mandiri MOOC pada layanan LKPP; serta
- 13) Kegiatan lainnya yang menggunakan rapat virtual / daring.

Optimalisasi dalam rangka efisiensi pun juga dilakukan dengan mengurangi penggunaan kertas untuk pelaporan, dengan kata lain hampir sebagian besar dokumen memanfaatkan teknologi digital, berupa scan atau data-data digital lain dalam hal *sharing* data kepada instansi lain (pusat atau pemda) dan kebutuhan arsip digital yang juga dilakukan dengan aplikasi seperti Google Drive, maupun Microsoft OneDrive, serta aplikasi pendukung lainnya.

3.7. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Aplikasi MyPKP dengan alamat situs <https://my.pkp.go.id/>. Aplikasi ini memiliki banyak layanan fitur, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan yaitu:

- a) Fitur Presensi sebagai pelaporan bukti kehadiran yang berpengaruh ada kinerja pegawai.
- b) Integrasi dengan <https://eoffice.pkp.go.id/> yang merupakan layanan history presensi, naskah dinas seperti persuratan, pengajuan izin/cuti, serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang mendapat disposisi dari pimpinan.
- c) Fitur layanan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) termasuk di dalamnya penyusunan SKP dan pengunggahan dokumen SKP seperti bukti dukung hasil kinerja sebelum dilakukan penilaian kinerja.
- d) Fitur layanan Monitoring Realisasi Keuangan dan Fisik kegiatan. Pada fitur ini lebih difokuskan pada pengisian dan pemantauan data pemaketan kegiatan beserta nilai pagu yang melekat pada kegiatan tersebut. Kemudian dilakukan pengisian progres realisasi fisik berdasarkan realisasi nyata secara berkala sebagai upaya pelaporan terintegrasi.
- e) Fitur layanan Pembangunan Zona Integritas. Fitur ini lebih mengarah pada pengunggahan dokumen bukti dukung sebagai pelaporan upaya pembangunan Zona Integritas khususnya di lingkungan BP3KP Kalimantan I.
- f) Pelaporan Summary dan Detail Data Tiga Juta Rumah, merupakan fitur pelaporan data capaian 3 juta rumah dengan status capaian masing-masing kabupaten/kota khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Aplikasi MR.PKP dengan alamat situs <https://mr.pkp.go.id/>, merupakan situs yang digunakan sebagai wadah untuk penyusunan Komitmen Manajemen Risiko yang mencakup Pengisian Profil Balai termasuk Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko, Penyusunan Sasaran Tujuan, Daftar Pemangku Kepentingan, Penyusunan Profil Risiko Umum, Profil Risiko Korupsi, hingga jadwal pemantauan RTP (Rencana Tindak Pengendalian). Di dalam nya juga terdapat fitur untuk mengunggah dokumen sebagai bukti dukung pemantauan Pengendalian Risiko. Meskipun situs yang digunakan masih memerlukan beberapa peningkatan layanan, namun fitur yang dihadirkan cukup lengkap dan tertata dengan baik.

Layanan data *cloud* / penyimpanan data secara digital, seperti Google Drive dan/atau Microsoft OneDrive sebagai wadah untuk mengunggah laporan *soft-file* yang diminta oleh pusat berkaitan dengan pelaporan dokumen-dokumen seperti: 1) Perjanjian Kinerja; 2) Rencana Strategis 2025-2029; 3) Rencana Aksi 2025/2026/2027/2028/2029; 4) Laporan Kinerja Triwulan;

5) Laporan Kinerja Tahunan / LAKIP; 6) Laporan bukti dukung capaian kegiatan; 8) Laporan BMN; 9) Laporan Keuangan.

Aplikasi SIMAN sebagai wadah untuk penyusunan laporan wasdal BMN, yang kemudian dicetak dan ditandatangani kemudian diunggah kembali pada aplikasi tersebut yang terintegrasi dengan pusat.

3.8. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan perkantoran, keberhasilan maupun kegagalan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari serangkaian faktor yang saling berkaitan. Anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi instrumen penting untuk mewujudkan program kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta penyebab kegagalan menjadi krusial agar setiap kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

3.8.1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sumber faktornya, yaitu dari sisi internal dan dari sisi eksternal, dengan penjelasan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor Pendukung Keberhasilan dari sisi Internal	
1	Tersedianya Proses Bisnis serta SOP pada BP3KP Kalimantan I, sebagai acuan alur pelaksanaan program dan kegiatan.
2	Perencanaan Anggaran yang realistis sesuai kebutuhan dan prioritas program kegiatan di khususnya di lingkungan BP3KP Kalimantan I.
3	Proses administrasi termasuk keuangan yang selalu sesuai dengan standar akuntabilitas.
4	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan progres capaian kinerja terhadap target kinerja yang sudah ditetapkan.
5	Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang kompeten di bidangnya, sehingga target kinerja balai maupun satker tercapai.
6	Terpenuhinya hasil penyusunan profil risiko karena melibatkan pegawai-pegawai yang sudah mengikuti pelatihan analisis manajemen risiko.
Faktor Pendukung Keberhasilan dari sisi Eksternal	
1	Respon yang baik dari pihak pemerintah daerah, asosiasi, lembaga, pihak perbankan, dan instansi lainnya yang turut serta dalam berkolaborasi pada setiap kegiatan dalam pencapaian program Tiga Juta Rumah.
2	Dukungan dari Unit Organisasi (Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan) dalam mendukung kebutuhan balai terkait arahan serta sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan program Tiga Juta Rumah.

3.8.2. Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa faktor penyebab kegagalan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sumber faktornya, yaitu dari sisi internal dan dari sisi eksternal, dengan penjelasan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.26

Tabel 3.26 Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor Penyebab Kegagalan dari sisi Internal	
1	Masih perlunya dilakukan revidi pada Proses Bisnis BP3KP Kalimantan I terdahulu agar semakin relevan dan akurat sebagai dasar penyusunan SOP untuk mendukung kelancaran kinerja balai dan satker.
2	Masih ada perencanaan penganggaran yang belum matang, sehingga memerlukan koordinasi internal secara bersama-sama melibatkan staf dan pejabat terkait penganggaran, sehingga dapat mengurangi jumlah revisi POK yang berdampak pada nilai IKPA.
3	Kurangnya digitalisasi dokumen pertanggungjawaban, sehingga disarankan ke depannya untuk optimalisasi digitalisasi arsip pertanggungjawaban, untuk memudahkan pelaksanaan audit baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
3	Kurang intensifnya koordinasi internal, sehingga perlu meningkatkan intensitas koordinasi melibatkan balai dan satker terkait hasil monitoring dan evaluasi, untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyepakati tindak lanjut atas permasalahan yang ada.
4	Baru sebagian kecil dari jumlah pegawai yang ada telah mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi Analisis Manajemen Risiko, sehingga perlu dapat diberikan kesempatan bagi pegawai yang belum agar dapat mengikuti pelatihan hingga sertifikasi analisis MR, guna meningkatkan kualitas Komitmen MR hingga pada pengendalian MR.
5	Kondisi gedung kantor (tanah dan bangunan) BP3KP Kalimantan I yang merupakan milik instansi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan sistem pinjam pakai, sehingga terkendala pada pemenuhan aspek pembangunan zona integritas, khususnya dari segi persyaratan minimal Pelayanan Publik.
Faktor Penyebab Kegagalan dari sisi Eksternal	
1	Masih perlunya dilakukan revidi pada Proses Bisnis BP3KP Kalimantan I terdahulu agar semakin relevan dan akurat sebagai dasar penyusunan SOP untuk mendukung kelancaran kinerja balai dan satker.
2	Masih perlunya revidi dan melengkapi kekurangan SOP yang ada sebagai penegasan alur kinerja yang lebih optimal.

The background of the slide features a faded image of a house under construction, showing its roof and walls. A large, semi-transparent yellow arrow points from the left side towards the right, where the text is located.

BAB IV

PENUTUP

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kalimantan menghadapi tantangan kebijakan, sosial-demografi, ekonomi-pembiayaan, lingkungan-tata ruang, serta tata kelola kelembagaan yang saling berinteraksi. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian PKP melalui intervensi pada peningkatan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, penguatan tata kelola, serta dukungan manajemen. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjamin keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan mencakup penguatan kebijakan dan perencanaan melalui sinkronisasi lintas sektor dan konsistensi dengan RPJMN/Renstra, pengembangan inovasi pembiayaan perumahan melalui skema subsidi dan kemitraan dengan swasta, serta optimalisasi sumber daya dengan strategi pengadaan material yang efisien. Selain itu, integrasi aspek lingkungan dan mitigasi risiko bencana harus menjadi bagian dari penataan kawasan, disertai penguatan tata kelola melalui transparansi, monitoring, dan evaluasi kinerja. Pendekatan inklusif dan partisipatif juga perlu diterapkan dengan melibatkan masyarakat lokal dan memperhatikan keberagaman budaya. Secara lebih spesifik, tindak lanjut program telah mencakup pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung MBR dalam membangun atau meningkatkan kualitas rumah, pembangunan rumah susun sebagai solusi hunian layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, penanganan kawasan kumuh secara terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta peningkatan kualitas sanitasi rumah guna mendukung kesehatan masyarakat dan keberlanjutan hunian. Dengan demikian, rekomendasi ini menjadi arah komprehensif untuk memastikan keberhasilan program perumahan dan permukiman, sekaligus menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Kalimantan.

Berikut ini beberapa sub pembahasan berkaitan dengan kendala / permasalahan dan saran dari sudut pandang BP3KP Kalimantan I, dan Terobosan atau usulan BP3KP Kalimantan I.

4.1.1. Kendala/Permasalahan dan Saran

Kendala dan Permasalahan dari sudut pandang Satker Balai selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 yaitu sebagai berikut

No	KENDALA / PERMASALAHAN	SARAN
A	Umum	
1	Kantor BP3KP Kalimantan I masih milik	Perlunya pengadaan tanah untuk persiapan

	Pemprov Kalbar dengan system pinjam pakai, sehingga sulit untuk dilakukan pengembangan luasan Gedung dalam rangka menunjang aktivitas perkantoran	Pembangunan kantor Balai dan Satker dalam mendukung kinerja balai.
2	Kurangnya ruang untuk penyimpanan arsip pada BP3KP Kalimantan I	Perlunya tambahan anggaran untuk sewa gudang arsip, pada BP3KP Kalimantan I
3	Anggaran tidak terserap secara optimal	- DIPA sebaiknya segera terbit di awal tahun anggaran - Apabila ada pergantian pejabat perbendaharaan, sebaiknya dilaksanakan di awal tahun anggaran. - Sebaiknya perlu penambahan personil pembantu bendahara, mengingat terdapat 5 (lima) DIPA pada satu balai.
4	Sebaran CPB pada program BSPS sangat luas dan jauh	Perlunya pengadaan sewa Kendaraan Dinas Operasional bagi PPK di lingkungan satker provinsi.
5	Website balai masih berupa alamat: balai-p2p-Kalimantan-i	Perlu pembaharuan menjadi: p3kp-Kalimantan-I
6	Belum adanya website KLINIK-PKP	Perlu pengadaan Kembali website KLINIK PKP untuk Balai
B	Program BSPS	
1	Kesulitan dalam memverifikasi persyaratan minimal 3 tahun keterhunian rumah sebelum ditetapkan sebagai CPB	Perlunya kejelasan ketentuan dalam Juknis yang menentukan bukti dukung untuk menyatakan keterhunian minimal 3 tahun, atau dilakukan penyederhanaan terkait ketentuan tersebut.
2	Sebaran data CPB yang tidak merata dan berdampak pada penentuan KPB dengan kendala jarak tempuh antar desa	Alokasi data CPB perlu di kluster terlebih dahulu dari pusat dalam memenuhi ketentuan minimal 10 CPB dalam 1 Desa
3	Banyaknya data CPB yang belum terdaftar dalam DTSEN	Perlunya pemadanan data terlebih dahulu sebelum diinput ke dalam SIBARU
4	Keterbatasan waktu pada tahap verifikasi CPB, Rekrutmen TFL dan Pemilihan Toko Terbuka (PTT)	Perlunya alokasi tambahan waktu untuk setiap tahap kegiatan
B	Pembangunan Rusun	
1	Proses pengadaan Barang dan Jasa sangat lambat karena kurangnya anggota pokja sehingga harus mencari anggota pokja di luar dari Kementerian PKP.	- Sebaiknya pengadaan dilaksanakan melalui e-katalog V6 - Mendorong CPNS dan PPPK untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi PBJ. - Sebaiknya PPPK telah sertifikat PBJ dapat diperbolehkan untuk dilibatkan sebagai anggota Pokja PBJ.

4.1.2. Terobosan atau Usulan BP3KP Kalimantan I

Beberapa terobosan atau usulan yang ingin dicapai oleh BP3KP Kalimantan I sekaligus sebagai dorongan bagi kebijakan di level Kementerian PKP yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendorong untuk melakukan pembelian tanah untuk kantor balai dan satker;
- 2) Mendorong rencana pembelian tanah untuk Rumah Susun ASN Kementerian PKP;

- 3) Mendorong Klinik PKP untuk lebih aktif (menyediakan bank desain bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan setempat Universitas Tanjung Pura, Politeknik Negeri Pontianak serta Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia);
- 4) Mendorong material pengganti kayu untuk BSPS;
- 5) Mendorong pengalokasian stok RISHA di wilayah Kalimantan;
- 6) Mendorong pembentukan Desa bebas dari RTLH sebagai wujud pemenuhan Rumah Layak Huni;
- 7) Mendorong pemenuhan kebutuhan rumah FLPP bagi pegawai CPNS dengan perumahan dalam satu Kawasan/kelompok perumahan;
- 8) Digitalisasi arsip dokumen kegiatan program BSPS dan kegiatan lainnya;
- 9) Mendorong PPPK untuk dapat menjadi anggota Pokja PBJ; dan
- 10) Menetapkan CPNS sebagai penggerak pembangunan ZI.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang. Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang dicapai oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam program pembangunan rumah layak huni di tahun berikutnya, yakni:

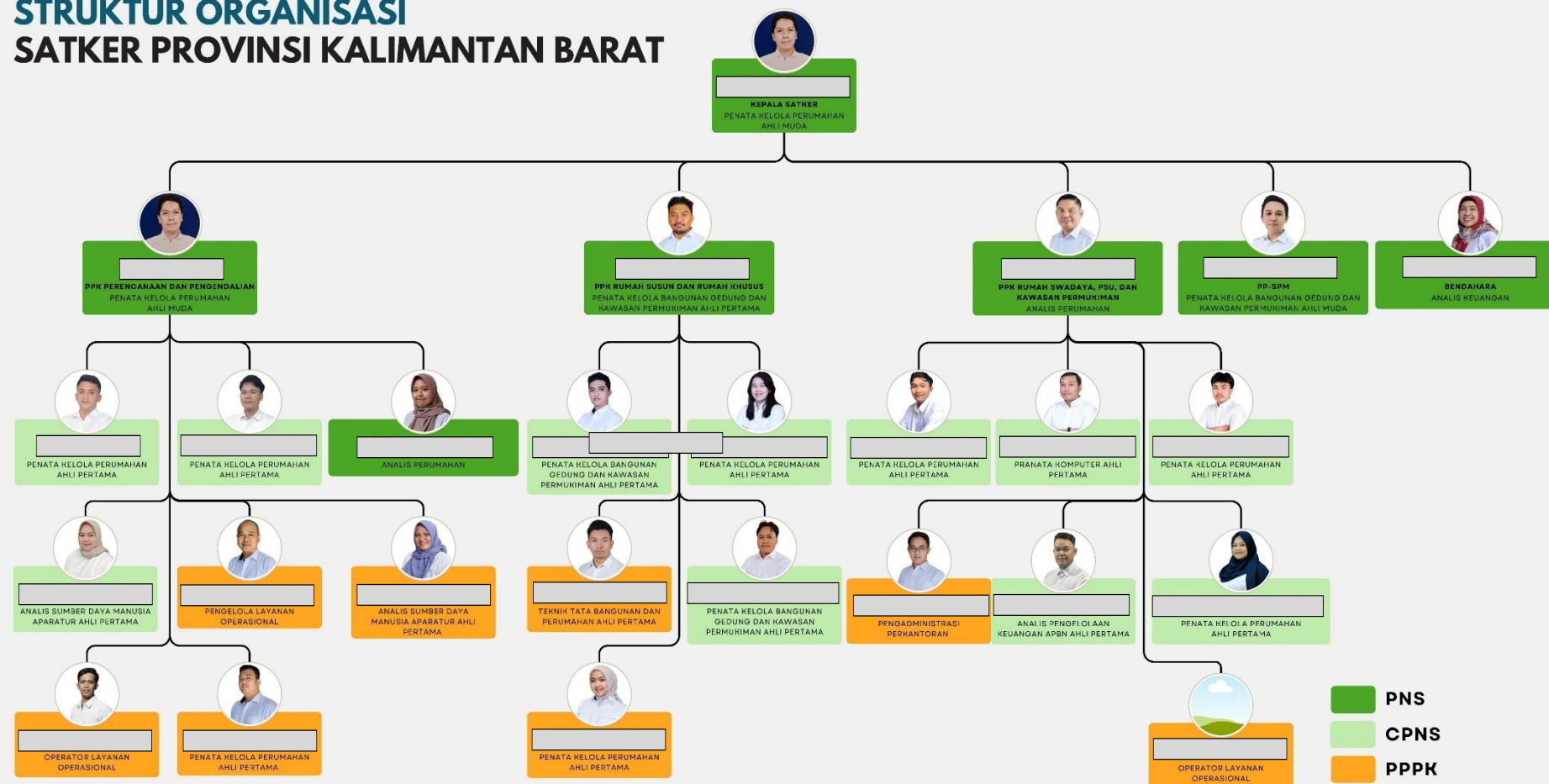
- 1) Menjaga lini masa pekerjaan program rumah swadaya sehingga tidak menetapkan Penerima Bantuan BSPS pada Triwulan IV tahun anggaran berjalan yang berpotensi tidak bisanya ditetapkan penerima bantuan pengganti ketika terdapat penerima bantuan yang mengundurkan diri;
- 2) Perlu adanya kolaborasi masif antarstakeholder guna mendukung satu basis data yang akurat dan actual sehingga mempercepat proses verifikasi penerima bantuan perumahan;
- 3) Perlu adanya transparansi terkait prioritas pembangunan bantuan perumahan sehingga ketika pemerintah daerah/stakeholder mengajukan bantuan dapat mengetahui urutan prioritas penerima bantuan di tahun berjalan.

The background of the page is a faded photograph of a house under construction. The house has a light-colored exterior and a dark roof. A large, semi-transparent yellow shape, resembling a folded corner or a large arrow pointing right, is overlaid on the right side of the image. The word "LAMPIRAN" is written in bold, dark blue capital letters on the yellow shape.

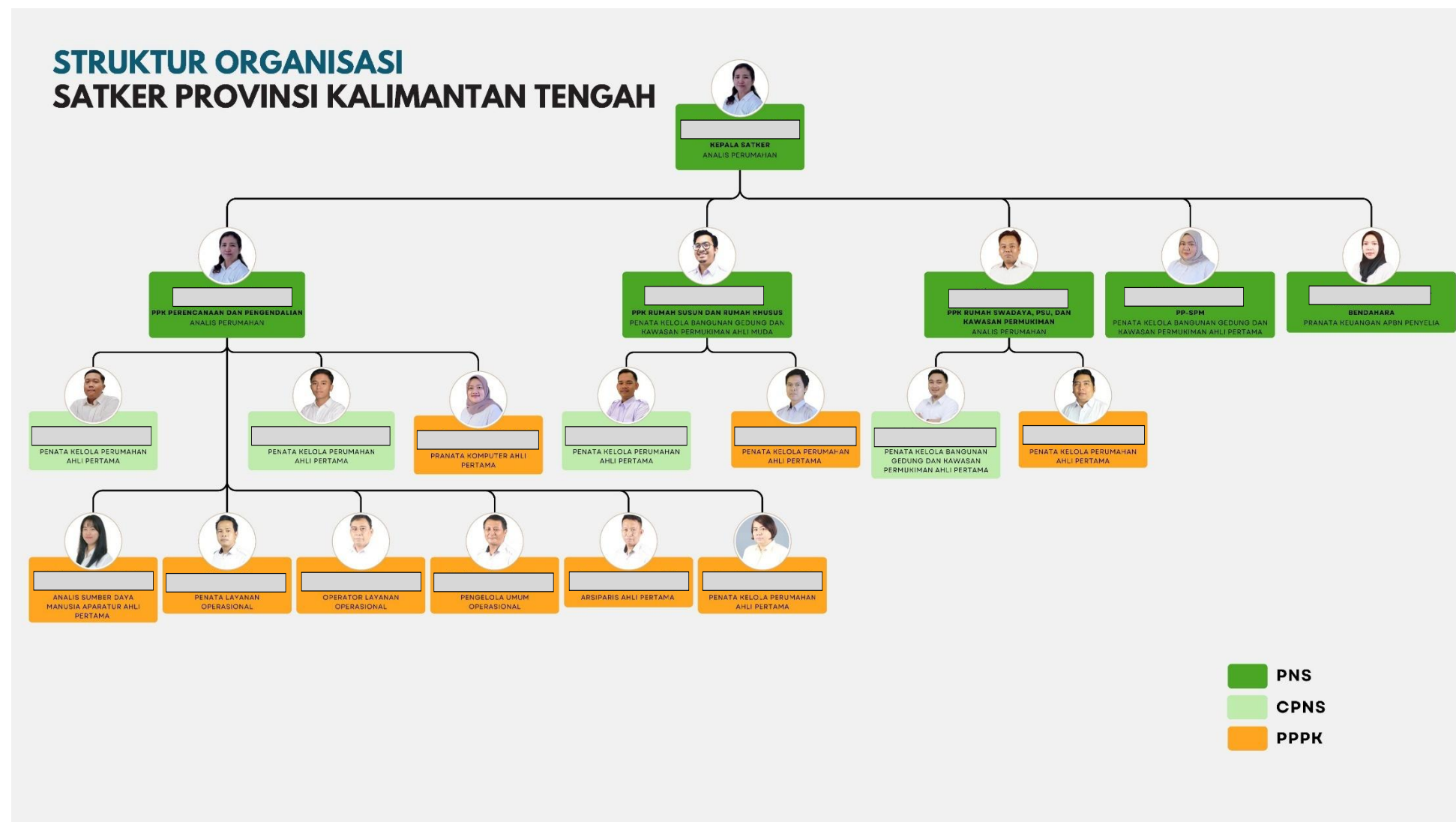
LAMPIRAN

Lampiran 2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

STRUKTUR ORGANISASI SATKER PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Lampiran 3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah



Lampiran 4 Kondisi Prasarana Gedung Kantor BP3KP Kalimantan I



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Lokasi :

Jl. Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Status Kepemilikan :

Gedung milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan status pinjam pakai.
 (Nomor SK : 1864/BKAD/2023 tanggal 27 November 2023, masa pinjam pakai berakhir 26 November 2026)

Luas Tanah/Bangunan :

LT. 1.629 M2 / LB. 720.6 M2

(Luasan sudah termasuk bangunan Satker PKP Kalbar)

Kondisi Bangunan :

- Kondisi fisik kantor kurang baik.
- Lantai bangunan rendah dari jalan, sehingga memerlukan peninggian lantai, mempertimbangkan kondisi pasang air sungai pada musim tertentu.
- Memerlukan pengembangan luasan ruang.



Lobby / Resepsionis



Ruang Rapat



Ruang Kerja Staf





Ruang Kepala Balai



**Ruang Kepala Subbagian
Umum dan Tata Usaha**



Ruang Layanan Klinik PKP



Atribut dan Koridor



Lampiran 5 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I - Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691409/2025



DS-9063-8036-1040-5408

Revisi ke 03

Tanggal : 13 November 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691409) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |
| Sebesar | : Rp. | 1.073.888.000 (SATU MILIAR TUJUH PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen
 146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang
 Rp. 1.073.888.000
 Rp. 1.073.888.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.073.888.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 1.073.888.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.01.1.691409/2025 I A. INFORMASI KINERJA



DS-9063-8036-1040-5408

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode/Nama Satker : (691409) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 1

Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.073.888.000
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1.073.888.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.073.888.000
Rincian Output	: 01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.073.888.000
		1.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	
		1.00 Layanan	

Jakarta, 02 Desember 2024
 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
 Manuarir Sirait

Lampiran 6 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I – Ditjen Kawasan Permukiman


 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691463/2025



DS.8094-1200-0098-9252

Revisi ke 03

Tanggal : 15 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691463)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
Sebesar	: Rp.	535.508.000 (LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

 146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah Uang

 Rp. 535.508.000
 Rp. 535.508.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	535.508.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 535.508.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

 Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.03.1.691463/2025 I A. INFORMASI KINERJA



DS.8094-1200-0098-9252

 Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode/Nama Satker : (691463) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	535.508.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	535.508.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output	1	: 7659.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,00 Laporan, Layanan 485.508.000
Rincian Output	: 01	FAE.001 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akutabilitas Kinerja	1,00 Laporan 155.208.000
	: 02	FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00 Laporan 330.300.000
Klasifikasi Rincian Output	2	: 7659.PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 50.000.000
Rincian Output	: 01	PBF.001 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,00 Rekomendasi Kebijakan 50.000.000

 Jakarta, 02 Desember 2024
 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

 ttd.
 Manuarar Sirait

Lampiran 7 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I – Ditjen Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691517/2025



DS:7804-4900-0955-0109

Revisi ke 03

Tanggal : 24 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (04) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691517) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |
| Sebesar | : Rp. | 498.538.000 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah Uang
 Rp. 498.538.000
 Rp. 498.538.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 498.538.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 498.538.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.04.1.691517/2025 I A. INFORMASI KINERJA



DS:7804-4900-0955-0109

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode/Nama Satker : (691517) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 1

Program	: 146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	498.538.000
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	498.538.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7660.AEA	Koordinasi	1,00 kegiatan 316.684.000
Rincian Output	: 01 AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00 kegiatan 316.684.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 181.854.000
Rincian Output	: 01 FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,00 Laporan 181.854.000

Jakarta, 02 Desember 2024
 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
 Manuarar Sirait

Lampiran 8 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I – Ditjen Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691571/2025



DS 8800-6789-5601-3640

Revisi ke 04

Tanggal : 17 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691571) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |
| Sebesar | : Rp. 1.181.193.000 | (SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 1.181.193.000
 Rp. 1.181.193.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.181.193.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 1.181.193.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengimban berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.05.1.691571/2025 I A. INFORMASI KINERJA



DS 8800-6789-5601-3640

- Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode/Nama Satker : (691571) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 1

Program	: 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			1.181.193.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			1.181.193.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	901.302.000
Rincian Output	: 01	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	387.597.000
	: 02	ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	203.887.000
	: 03	ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	309.818.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	279.891.000
Rincian Output	: 01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan	279.891.000

Jakarta, 02 Desember 2024
 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
 Manuarar Sirait

Lampiran 9 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I – Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691606/2025



DS.5555-6064-6597-8085

Revisi ke 02

Tanggal : 14 Juli 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (06) | DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691606) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |
| Sebesar | : Rp. 303.466.000 | (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Uang
 Rp. 303.466.000
 Rp. 303.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 303.466.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 303.466.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.06.1.691606/2025 I A. INFORMASI KINERJA



DS.5555-6064-6597-8085

- Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode/Nama Satker : (691606) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 1

Program	: 146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		303.466.000
Kegiatan	: 7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		303.466.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau		
	2. 02	Tersusunnya NSPK yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau		
	3. 03	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar keandalan bangunan (Kab/Kota)		
	4. 04	Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan yang siap dikerjasamakan (%)		
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00 Rekomendasi Kebijakan	303.466.000
Rincian Output	: 01 ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1,00 Rekomendasi Kebijakan	129.233.000
	02 ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1,00 Rekomendasi Kebijakan	174.233.000

Jakarta, 02 Desember 2024
 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
 Manuarar Sirait

Lampiran 10 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I - Sekretariat Jenderal

REVISI-02


 KEMENTERIAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 November 2025

Pihak Kedua


Didyk Choiroel
 NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama

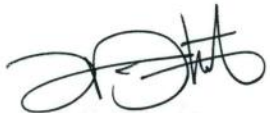

Arifay Saini
 NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I			
SEKRETARIAT JENDERAL			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	3 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Rp 1.073.888.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Rp 617.919.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Rp 660.469.000,00
	Rp 2.352.276.000,00

Jakarta, 17 November 2025

SEKRETARIS JENDERAL


DIDYK CHOIROEL

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I**


ARIFAY SAINI

Lampiran 11 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I – Ditjen Kawasan Permukiman

REVISI-01


 KEMENTERIAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
 Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

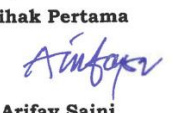
- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua


Fitrah Nur
 NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama


Arifay Saini
 NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		4 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1279 Unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	5 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	20,02 Hektar

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

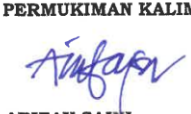
PAGU APBN

1	Rp	535,508,000.00
2	Rp	41,151,876,000.00
3	Rp	688,502,000.00
	Rp	42,375,886,000.00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I


ARIFAY SAINI

Lampiran 12 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I – Ditjen Perumahan Perdesaan


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Agustus 2025


Pihak Kedua
Imran
 NIP. 19731026 199302 1 001


Pihak Pertama
Arifay Saini
 NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
		2. Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	3. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	1 Unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp	316,684,000.00
Rp	8,444,525,000.00
Rp	105,269,000.00
Rp	8,866,478,000.00


DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
IMRAN


KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
ARIFAY SAINI

Lampiran 13 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I – Ditjen Perumahan Perkotaan


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Sri Haryati
 NIP. 19740707 199703 2 004

Jakarta, 01 Agustus 2025

Pihak Pertama


Arifay Saini
 NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	3 Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		4 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	5 Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		6 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	2 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp	250,182,000.00
Rp	105,520,000.00
Rp	19,976,096,000.00
Rp	20,331,798,000.00

Jakarta, 01 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I


ARIFAY SAINI

Lampiran 14 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan I – Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

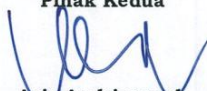
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

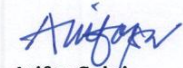
Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama



Arifay Saini
NIP. 197308272003121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

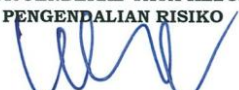
- 1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

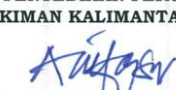
Rp 303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**


AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMANTAN I**


ARIFAY SAINI

Lampiran 15 BA Kesepakatan Capaian Output Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I

Jalan Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78122 e-Mail: bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2025
 Nomor: 01.1 /BA/Bp12/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** telah disepakati Capaian *Output* Tahun 2025, **DIPA Sekretariat Jenderal**, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	1	100%

Demikian capaian *output* ini disepakati berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025. Semoga hasil Berita Acara ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025.

Disetujui oleh,

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kalimantan I



Ir. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
 NIP. 197308272003121005

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat



Michael Robert, S.T.
 NIP. 197206082006041002



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I

Jalan Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78122 e-Mail: bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN CAPAIAN *OUTPUT* TAHUN 2025
 Nomor: 01.2/BA/Bp12/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** telah disepakati Capaian *Output* Tahun 2025, **DIPA Ditjen Kawasan Permukiman**, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	100%
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1279	1279	100%
Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	19.92	19.92	100%

Demikian capaian *output* ini disepakati berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025. Semoga hasil Berita Acara ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025.

Disetujui oleh,

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I



Ir. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
 NIP. 197308272003121005

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat



Michael Robert, S.T.
 NIP. 197206082006041002



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I

Jalan Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78122 e-Mail: bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN CAPAIAN *OUTPUT* TAHUN 2025
 Nomor: 01.4/BA/Bp12/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** telah disepakati Capaian *Output* Tahun 2025, **DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan**, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	1	1	100%
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100%
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100%
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	1575	1575	100%

Demikian capaian *output* ini disepakati berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025. Semoga hasil Berita Acara ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025.

Disetujui oleh,


 Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
Ir. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
 NIP. 197308272003121005


 Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Michael Robert, S.T.
 NIP. 197206082006041002



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I

Jalan Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78122 e-Mail: bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN CAPAIAN *OUTPUT* TAHUN 2025

Nomor: 013 /BA/Bp12/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** telah disepakati Capaian *Output* Tahun 2025, **DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan**, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100%
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	242	242	100%

Demikian capaian *output* ini disepakati berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025. Semoga hasil Berita Acara ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025.

Disetujui oleh,

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kalimantan I



Ir. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
NIP. 197308272003121005

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat



Michael Robert, S.T.
NIP. 197206082006041002

Lampiran 16 BA Kesepakatan Capaian Output Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I

Jalan Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Tengah, 78122 e-Mail: bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2025
 Nomor: *Q.5*/BA/Bp12/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** telah disepakati Capaian *Output* Tahun 2025, **DIPA Sekretariat Jenderal**, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	1	100%

Demikian capaian *output* ini disepakati berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Semoga hasil Berita Acara ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025.

Disetujui oleh,

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
 Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kalimantan I



Ir. Anifay Saini, S.T., M.Eng.
 NIP. 197308272003121005

Kepala Satuan Kerja
 Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Provinsi Kalimantan Tengah



Yuli Kristina, S.T., M.P.W.K.
 NIP. 197807162009012003



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I

Jalan Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Tengah, 78122 e-Mail: bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN CAPAIAN *OUTPUT* TAHUN 2025
 Nomor: 01-6 /BA/Bp12/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** telah disepakati Capaian *Output* Tahun 2025, **DIPA Ditjen Kawasan Permukiman**, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	0.10	0.10	100%

Demikian capaian *output* ini disepakati berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Semoga hasil Berita Acara ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025.

Disetujui oleh,

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kalimantan I


Ir. Arifay Salmi, S.T., M.Eng.
 NIP. 197308272003121005

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Tengah


Yuli Kristina, S.T., M.P.W.K.
 NIP. 197807162009012003



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I

Jalan Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Tengah, 78122 e-Mail: bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2025
 Nomor: 01.8/BA/Bp12/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal Lima bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** telah disepakati Capaian *Output* Tahun 2025, **DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan**, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100%
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100%
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	624	619	99.20%

Demikian capaian *output* ini disepakati berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Semoga hasil Berita Acara ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025.

Disetujui oleh,



Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kalimantan I

I. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
 NIP. 197308272003121005



Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Tengah

Muli Kristina, S.T., M.P.W.K.
 NIP. 197807162009012003



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KALIMANTAN I

Jalan Imam Bonjol No.116, Benus Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Tengah, 78122 e-Mail: bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN CAPAIAN *OUTPUT* TAHUN 2025
 Nomor: 01- 7 /BA/Bp12/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah disepakati Capaian *Output* Tahun 2025, **DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan**, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100%
Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	43	43	100%
Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	244	243	99.59%

Demikian capaian *output* ini disepakati berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Semoga hasil Berita Acara ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025.

Disetujui oleh,

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kalimantan I



Ir. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
NIP. 197308272003121005

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Tengah



Yuli Kristina, S.T., M.P.W.K.
NIP. 197807162009012003



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



Jl. Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan,
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat



bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id